



**INTERVENSI MILITER AMERIKA SERIKAT DI SURIAH
ERA DONALD TRUMP**

***UNITED STATE'S MILITARY INTERVENTION IN SURIAH
UNDER DONALD TRUMP ADMINISTRATION***

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD MAHARANI SOEBROTO

NIM 120910101058

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**INTERVENSI MILITER AMERIKA SERIKAT DI SURIAH
ERA DONALD TRUMP**

***UNITED STATE'S MILITARY INTERVENTION IN SURIAH
UNDER DONALD TRUMP ADMINISTRATION***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)

Oleh

MUHAMMAD MAHARANI SOEBROTO

NIM 120910101058

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala atas rahmat serta berkat ridho yang tiada berkesudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Soebroto dan Ibu Sri Agustini
2. Saudara saya Muhammad Nouval Farrel Fernanda
3. Para sahabat
4. Dosen serta staff Perguruan Tinggi

Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Jember

MOTTO

“Homo Homini Lupus”¹

(Manusia adalah serigala bagi sesama manusianya)



¹ Thomas Hobbes dalam karyanya berjudul De Cive (1651)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Maharani Soebroto

NIM : 120910101058

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“INTERVENSI MILITER AMERIKA SERIKAT DI SURIAH ERA DONALD TRUMP”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2019
Yang menyatakan,

Muhammad Maharani
Soebroto
NIM 120910101058

SKRIPSI

**INTERVENSI MILITER AMERIKA SERIKAT DI SURIAH ERA
DONALD TRUMP**

***UNITED STATE'S MILITARY INTERVENTION IN SURIAH UNDER DONALD
TRUMP ADMINISTRATION***

Oleh

MUHAMMAD MAHARANI SOEBROTO

120910101058

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA. Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Intervensi Militer Serikat di Suriah Era Donald Trump” karya Muhammad Maharani Soebroto telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal :Jumat, 19 Juli 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Anggota I,

Agus Tri Hartono, S.Sos, MA., Ph.D.

NIP 196908151995121001

Linda Dwi Eriyanti, S.Sos., M.A.

NIP 197812242008122001

Mengesahkan

Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP 196106081988021001

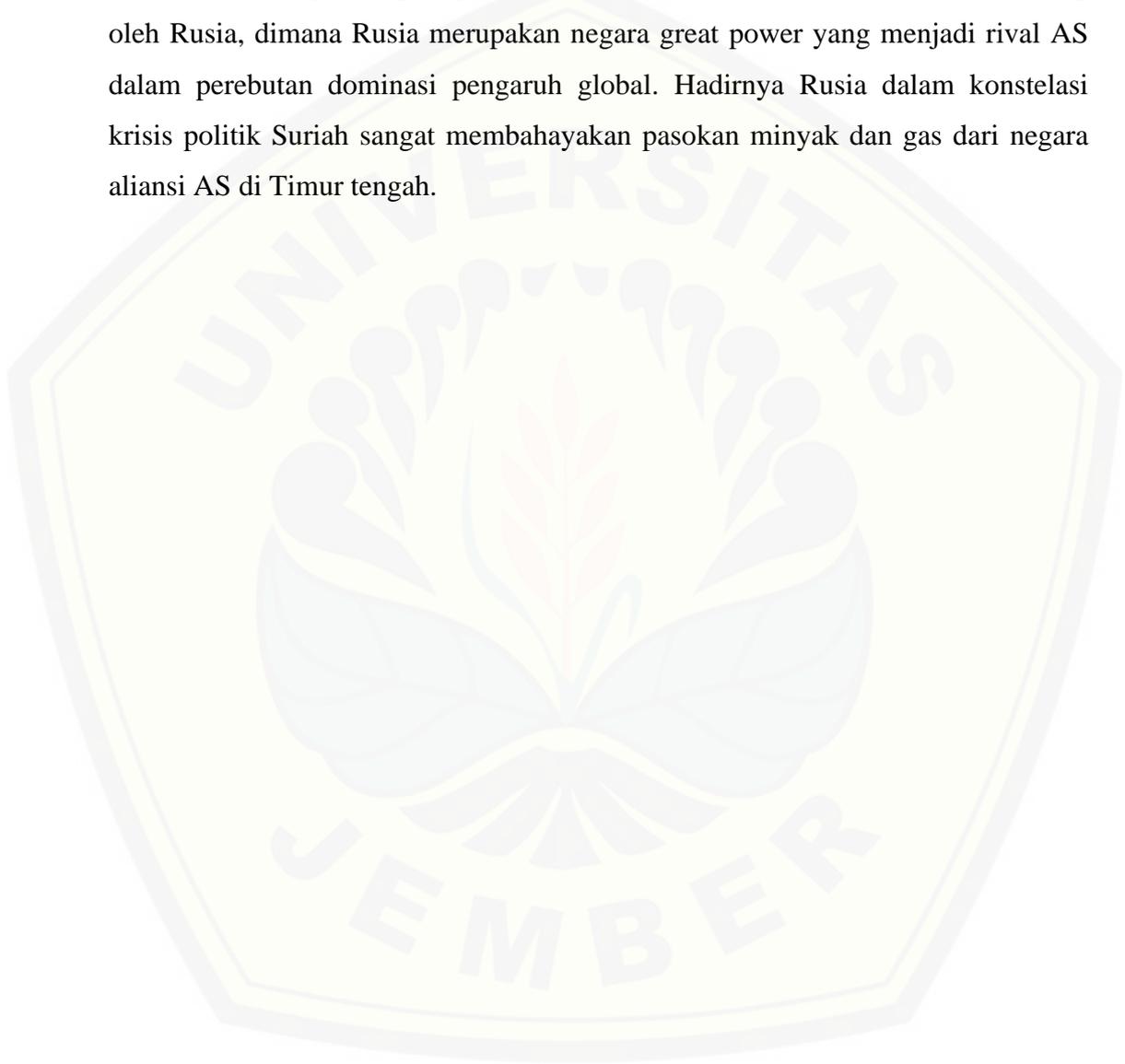
RINGKASAN

Intervensi Militer Serikat di Suriah Era Donald Trump: Muhammad Maharani Soebroto, 120910101058: 2019: 65 Halaman: Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Intervensi militer Amerika Serikat dilakukan karena konflik di Suriah semakin terekskalasi seiring dengan digunakannya senjata kimia oleh pemerintah Suriah. Respon tersebut dilandasi oleh kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah termasuk di Suriah yakni, memberantas terorisme, mempromosikan demokrasi, menjaga stabilitas keamanan di Timur Tengah, serta memastikan ketersediaan pasokan energi bagi konsumsi negaranya terpenuhi. Posisi Suriah yang strategis dari aspek geopolitik membuat AS memiliki banyak dimensi kepentingan AS seperti kepentingan menjaga stabilitas kawasan. Status AS sebagai negara hegemon di kawasan Timur tengah, konflik Suriah yang melibatkan aktor rival AS yaitu Rusia di dunia internasional menjadi ancaman bagi AS atas status sebagai negara great power. Posisi Suriah yang terletak di jalur dagang dunia yaitu Laut Mediterania. Jalur laut mediteranaia yang merupakan jalur strategis (choke point) perdagangan membuat banyaknya aktor global memperebutkan penguasaan laut mediterania sehingga menguasai Suriah menjadi strategis untuk menguasai laut mediterania. Hal ini yang menyebabkan AS akan terus memperkuat pengaruh di Suriah dalam rangka akumulasi kekuatan di Laut Mediteranian

Pembuatan skripsi ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mencari data-data sekunder yang sesuai untuk menjelaskan permasalahan. Pengumpulan data yang digunakan lebih difokuskan pada informasi yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar cetak maupun elektronik, dan data berupa artikel yang bersumber dari internet yang terkait dengan topik permasalahan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah konsep Kepentingan Nasional yang dianggap sesuai dan relevan untuk menjelaskan alasan Amerika Serikat mengintervensi konflik di Suriah

Keputusan AS untuk melakukan invasi didukung oleh faktor kalkulasi kepentingan suplai gas terhadap negara-negara aliansi yaitu Eropa. Pasokan gas dari Qatar yang melewati Suriah harus diamankan oleh AS dan aliansinya agar terus mendapatkan pasokan gas. Faktor pendorong lainnya yang mengakibatkan AS melakukan serangan langsung ke Suriah karena rezim Bashar Al Assad di dukung oleh Rusia, dimana Rusia merupakan negara great power yang menjadi rival AS dalam perebutan dominasi pengaruh global. Hadirnya Rusia dalam konstelasi krisis politik Suriah sangat membahayakan pasokan minyak dan gas dari negara aliansi AS di Timur tengah.



PRAKATA

Puji syukur atas rahmat Allah SWT serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“INTERVENSI MILITER AMERIKA SERIKAT DI SURIAH ERA DONALD TRUMP”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak sepenuhnya usaha sendiri. Penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas segala bentuk bimbingan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si NIP selaku Dosen Pembimbing II Dimana keduanya telah meluangkan waktu di antara serangkaian kesibukan, untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa,
6. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Soebroto dan Ibu Sri Agustini, Almarhum kakek saya, dan nenek saya satu satunya yang tersisa dan

tercinta. Mereka selalu memberikan dukungan seperti; doa dan nasehat, serta semangat bagi penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

7. Para rekan seperjuangan, Mahasiswa Hubungan Internasional terutama angkatan 2012.
8. Sahabat saya: Aad, Eka, Towik, Anggra, Willy, Rizki, Ojan, Erwin, Bombom, Ucenk.
9. Para rekan ngopi dan diskusi: Fiki, Kiki, Itok kecil, Bayu, Bahrul, dll
10. Para rekan kerja saya: Bossku Tante Nurul, Mahfud, Dika, Ivan, Om Wily, Om Aan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, Juni 2019

Penulis

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | |
|--|----|
| 2.1 Gambar Wilayah Suriah..... | 17 |
| 3.1 Tabel Doktrin Presidensial Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pasca-Perang Dunia II | 28 |
| 3.1 Gambar Korban Perang Sipil Suriah..... | 32 |
| 3.2 Peta Polarisasi konflik Suriah | 33 |
| 3.3 Peta Polarisasi konflik Suriah paska ISIS | 34 |
| 3.4 Gambar Grafik Data Serangan ISIS | 37 |
| 3.5 Gambar Grafik Data Pengungsi Suriah..... | 39 |
| 4.1 Gambar Data Pesawat Tempur Rusia di Suriah..... | 43 |
| 4.2 Gambar Geopolitik Suriah | 44 |
| 4.3 Gambar Geopolitik Laut Mediterania | 46 |
| 4.4 Gambar Data serangan ISIS sejak 2016 sampai dengan 2018..... | 47 |
| 4.5 Gambar Pejuang ISIS dari negara-negara di Dunia yang masuk ke Suriah.... | 48 |
| 4.6 Gambar Rivalitas AS Dan Rusia Dalam Melawan ISIS Di Suriah..... | 49 |
| 4.7 Gambar Demokrasi di Timur Tengah | 53 |
| 4.8 Gambar Peta Jalur Minyak Dan Gas | 55 |
| 4.9 Gambar Peta Jalur Pipa Minyak Dan Gas Melalui Mediteranian | 56 |
| 4.10 Gambar Kebutuhan Minyak AS..... | 57 |

DAFTAR SINGKATAN

- AS : Amerika Serikat
FSA : *Free Surian Army*
PBB : Perserikatan Bangsa-bangsa
ISIS : *Islamic State of Iraq and Syria*
NSC : *National Security Council*
HDI : *Human Development Index*
UE : *Uni Eropa*
AUMF: *Authorization for Military Force*
NATO : *North Altantic Treaty Organization*
HAM : Hak Asasi Manusia

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSEMBAHAN | ii |
| MOTTO | iv |
| PERNYATAAN | v |
| LEMBAR BIMBINGAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| RINGKASAN | viii |
| PRAKATA | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR SINGKATAN | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan | 6 |
| 1.2.1 Batasan Materi | 6 |
| 1.2.2 Batasan Waktu | 6 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.5 Kerangka Konseptual | 7 |
| 1.5.1 Teori Kepentingan Nasional | 8 |
| 1.6 Argumen Utama | 13 |
| 1.7 Metode Penelitian | 14 |
| 1.7.1 Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 1.7.2 Teknik Analisis Data | 15 |
| 1.8 Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB 2. KONFLIK SURIAH | 17 |
| 2.1 Awal Kepemimpinan Dinasti Assad Hingga Kepemimpinan Bashar al Assad | 17 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2 Awal Mula Konflik di Suriah | 20 |
| BAB 3. SIKAP AMERIKA DALAM MERESPON KONFLIK DI SURIAH | 27 |
| 3.1 Respon Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah.. | 27 |
| 3.2 Kebijakan AS di Suriah | 30 |
| BAB 4. ALASAN AMERIKA SERIKAT MENYERANG SURIAH | 41 |
| 4.1 Kepentingan AS Untuk Menjaga Stabilitas Kawasan dan Perluasan Pengaruh..... | 41 |
| 4.2 Kepentingan AS Untuk Memberantas Terorisme..... | 47 |
| 4.3 Kepentingan Ekonomi Amerika Serikat | 54 |
| BAB 5. KESIMPULAN | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan keadaan politik domestik di negara - negara Timur Tengah mulai yang berkejolak pada akhir 2010 semakin memanas dan mendapatkan perhatian global. Peristiwa yang dikenal dengan istilah *Arab Spring* dikarenakan bertepatan dengan musim semi yaitu sebuah revolusi negara – negara di Timur Tengah untuk menjatuhkan rezim yang otoriter dan menciptakan sebuah tatanan negara yang baru. Arab Spring bermula dari Tunisia pada 17 Desember 2010 lalu menular ke berbagai negara Timur Tengah seperti Mesir, Libya, Yaman, Bahrain hingga ke Suriah. Peristiwa *Arab Spring* mendapatkan perhatian global karena timbulnya konflik akibat dari revolusi itu sendiri serta sudah banyak menelan korban jiwa terutama di negara Suriah. Konflik di Suriah bermula pada 6 Maret 2011 gelombang demonstrasi pro-demokrasi menyebar keseluruh penjuru Suriah. Dalam perkembangannya pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menghadang aksi para demonstran yang sudah menelan banyak korban jiwa serta jutaan gelombang pengungsi yang datang ke segala penjuru Eropa serta Turki yang berasal dari Suriah. Dalam laporan PBB pada pertengahan tiga bulan awal tahun 2017 Turki menampung hampir tiga juta warga Suriah dan jika ditotal keseluruhan pengungsi yang melarikan diri dari konflik Suriah mencapai lima juta jiwa. (UNHCR, 2017)

Konflik di Suriah berawal adanya ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Banyaknya pejabat pemerintahan yang korup serta kurangnya kebebasan sipil, dimana rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi dan menyuarakan pendapat di muka umum selalu dihentikan dengan cara kekerasan oleh pemerintah Suriah (Catherine Burns, 2016). Hal ini ditambah lagi dengan legitimasi politik Presiden Bashar al-Assad ketika memimpin Suriah yang

cenderung mengalami penurunan dari tiap tahun akibat tiga persoalan utama yakni otoritas (*authority*), identitas (*identity*), dan persamaan (*equality*) (Hudson, 1977, hal. 4) Dari segi otoritas, Presiden Assad memang terpilih melalui pemilihan umum, tapi pada saat itu tidak ada calon lain selain Bashar al Assad. Sementara dari segi identitas, Bashar al Assad berasal dari kelompok shiah alawiyah yang hanya sebagian kecil dari mayoritas penduduk Suriah yang beragama Islam sunni dan dari segi persamaan, baik ayah maupun anak sama-sama membedakan perlakuan antarmasyarakat yang beragama Islam shiah dan Islam sunni. Ketiga faktor itulah yang membuat rakyat Suriah sangat menginginkan adanya pergantian rezim.

Rakyat Suriah mengungkapkan ketidakpuasannya kepada pemerintahan rezim Bashar al-Assad dengan melakukan aksi turun ke jalan termasuk di ibu kota Damaskus dengan melakukan aksi demokrasi menuntut diturunkannya pemerintah Bashar al-Assad. Aksi itu direspon oleh tentara pemerintah Suriah dengan tindakan yang brutal dan penuh kekerasan yang menewaskan 23 jiwa dari pihak demonstran (BBC News, 9 April 2011). Hal tersebut yang memicu berkembangnya perang yang berlarut-larut antara pasukan pemerintah dengan pasukan pemberontak yang mulai mempersenjatai diri untuk menggulingkan rezim Assad (Catherine Burns, 2016). Presiden Bashar Al-Assad selaku kepala negara Suriah menanggapi keadaan yang sedang berlangsung di Suriah dengan menyatakan Presiden tidak akan lari dari tanggung jawab dan akan menyelesaikan masalah internal yang terjadi tanpa ada campur tangan dari negara lain. Hal itu mengindikasikan bahwa Bashar al-Assad masih ingin melanjutkan pemerintahannya dan enggan mendengarkan tuntutan rakyat Suriah yang menginginkannya lengser dari jabatan presiden Suriah.

Reaksi internasional cukup tajam dalam merespon tindakan brutal pemerintah Suriah dalam membubarkan demonstrasi rakyat Suriah dengan cara kekerasan yang menelan korban hingga 23 jiwa dari pihak demonstran (BBC News, 9 April 2011). Amerika Serikat di bawah pemerintahan mantan presiden Barrack Obama pada periode kedua ia memimpin, sejak awal sudah mengambil sikap tegas yakni tidak mendukung pemerintahan Bashar al Assad untuk tetap

memimpin Suriah. Obama juga pernah mengeluarkan sanksi melalui suatu perintah khusus (*executive order*). Melalui perintah khusus tersebut Obama membekukan semua aset pemerintah Suriah yang berada di wilayah yuridiksi Amerika Serikat dan juga melarang warga negara Amerika Serikat untuk berbisnis dengan pemerintah Suriah (Renne R.A Kawilarang, 2011). Melalui Dewan Keamanan (DK) PBB, Amerika Serikat juga mendukung draf resolusi untuk Suriah dengan tujuan untuk mengancam pemimpin pejabat pemerintahan di Suriah dengan sejumlah sanksi namun selalu gagal karena kerap di veto oleh Russia yang merupakan sekutu dekat Suriah. Hingga konflik Suriah memasuki tahun keenam pada awal April 2017, Russia sudah memveto delapan resolusi DK PBB untuk Suriah dengan tujuan melindungi aksi pemerintahan Bashar al Assad. China juga kerap mendukung Rusia dengan ikut memveto enam resolusi DK PBB untuk Suriah (kompas, 28 April 2017)

Amerika Serikat bersama 60 negara-negara lain yang tergabung dalam *The Group of The Syrian People* atau yang biasa disebut *Friends of Syria* sepakat meningkatkan tekanan terhadap rezim pemerintahan Bashar al Assad serta menyerukan komunitas internasional terutama anggota-anggota dewan keamanan PBB untuk bersatu dan mengambil tindakan tegas dan cepat demi adanya perubahan di Suriah (Detik News, 30 November 2012). Hal itu perlu dilakukan sebagai tekanan kepada pemerintahan Suriah karena melakukan tindakan brutal terhadap aksi-aksi demo anti pemerintah serta melakukan pelanggaran HAM berat kepada warga sipil. Negara-negara *Friends of Syria* juga perlu melakukan pendekatan kerja sama dengan Rusia jika benar-benar ingin mengakhiri konflik di Suriah karena selama ini Rusia selalu menjadi batu sandungan di dalam DK PBB terkait konflik Suriah.

Negara-negara *Friends of Syria* sering mengadakan pertemuan rutin untuk membahas kondisi Suriah dan mengambil tindakan konkrit untuk mencegah keadaan di Suriah menjadi semakin memburuk. Dalam beberapa pertemuannya, *Friends of Syria* telah mencapai kesepakatan bersama seperti memberikan pengakuan kepada Koalisi Nasional, yakni gabungan kelompok oposisi Suriah sebagai perwakilan rakyat Suriah serta memberikan bantuan keuangan kepada

kelompok oposisi yang diakui. *Friends of Syria* juga memberikan sanksi ekonomi kepada pemerintahan Bashar al Assad.

Selain permasalahan diatas, pemerintah Suriah juga melakukan pelanggaran penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil. Hal tersebut mengundang Amerika Serikat untuk mengambil tindakan terhadap apa yang dilakukan pemerintah Suriah. Senjata kimia digunakan oleh pemerintah Suriah untuk menyerang kelompok oposisi pada tahun 2013 dan membuat Presiden Barrack Obama berfikir untuk mengintervensi secara militer konflik yang terjadi di Suriah serta memberi pasokan persenjataan kepada kelompok oposisi. Tanggal 13 Juni 2013 Amerika Serikat memberikan bantuan pasokan senjata bagi kelompok oposisi Suriah setelah pemerintah Amerika Serikat memiliki bukti dan meyakini bahwa pemerintah Suriah kerap menggunakan senjata kimia untuk melawan kelompok oposisi (BBC, 14 Juni 2013). Presiden Barrack Obama juga sempat merencanakan serangan militer langsung atau *limited military strike*. Namun tidak jadi dilakukan karena Presiden Barrack Obama sepekat dengan usulan Rusia terkait pengambil alihan dan penghancuran senjata kimia milik Suriah dibawah monitoring internasional.

Amerika Serikat yang berganti presiden dari Barrack Obama ke Donald Trump pada Januari 2017 membuat perubahan drastis terkait sikapnya terhadap Suriah. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan sikapnya terkait Suriah melalui menteri luar negerinya, Rex Tillerson, yang mengatakan bahwa nasib Bashar al-Assad harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Namun hanya berselang sepekan sikap tersebut berubah setelah Rex Tillesen mengatakan bahwa Amerika Serikat ingin rezim Bashar al-Assad tumbang dan berencana akan melakukan beberapa langkah terkait penggulingan rezim Bashar al-Assad (Muhaimin, 2017)

Konflik di Suriah memasuki babak baru setelah Amerika Serikat melancarkan serangan langsung terhadap pangkalan udara pemerintah Suriah di Shayrat yang pada Jumat, 7 April 2017 sekitar pukul 03.45 waktu setempat. Amerika Serikat menembakkan sekitar 59 rudal kendali jarak jauh jenis tomahawk dari sejumlah kapal perang angkatan laut Amerika Serikat yang siaga

di perairan laut Mediterania, diantaranya adalah USS Porter dan USS Ross (Novi Christiastuti, 2017)

Serangan Amerika Serikat terhadap Suriah merupakan respon atas serangan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah pada Selasa 4 April 2017. Pasukan pemerintah Suriah yang dipimpin rezim Bashar al-Ashad melakukan serangan senjata kimia di Khan Sheikhoun, provinsi Idlib yang banyak menewaskan warga sipil. Menurut kelompok pemantau Suriah yang berkantor di Inggris, *Syrian Observatory for Human Rights*, 20 anak – anak dan 52 orang dewasa menjadi korban serangan pemerintah Suriah yang diduga menggunakan senjata kimia gas beracun di Khan Sheikhoun, Provinsi Idlib (BBC, 6 April 2017)

Serangan rudal Amerika Serikat tersebut adalah intervensi militer langsung pertama Amerika Serikat di Suriah sejak konflik Suriah bermula pada tahun 2011. Serangan rudal itu menjadi perintah militer paling dramatis pertama yang diambil Donald Trump semenjak dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke 45 pada 20 Januari 2017. Keputusan Donald Trump terhadap Suriah sangat bertentangan dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barack Obama yang memilih tidak melakukan intervensi militer langsung terhadap Suriah.

Obama lebih memilih pendekatan diplomatik daripada melakukan intervensi militer di Suriah. Amerika Serikat era Obama lebih memilih jalur diplomatik melalui Dewan Keamanan PBB dan berkoordinasi dengan negara-negara lainnya untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Suriah. Selama dua periode jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Obama menolak melakukan intervensi militer terhadap Suriah dengan dalih intervensi militer langsung Amerika Serikat di Suriah beresiko memicu masalah baru jika tidak dilakukan secara menyeluruh dan besar – besaran (Novi Christiastuti, 2016) . Hal tersebut belajar dari kegagalan intervensi militer Amerika Serikat di Timur Tengah seperti di Afghanistan dan Iraq dimana Amerika Serikat terlibat dalam perang berkepanjangan dan memicu konflik yang lebih luas di wilayah tersebut serta mengalami defisit keuangan. Menarik untuk meneliti lebih jauh mengenai alasan Donald Trump mengambil keputusan untuk mengintervensi militer

langsung Suriah dengan menyerang pangkalan udara milik pemerintah Suriah di Khan Sheikhoun, Provinsi Idlib. Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis memilih menggunakan judul;

“Intervensi Militer Amerika Serikat di Suriah pada Era Donald Trump”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan runtutan proses yang jelas dan benar. Untuk mendapatkan runtutan yang jelas dan benar diperlukan suatu ruang lingkup pembahasan. Dengan ditetapkannya ruang lingkup pembahasan, penelitian bisa lebih fokus pada kajian yang akan dianalisa dan mencegah analisa agar tidak terlampaui luas dan tidak efektif dalam membahas kajian yang sebenarnya. Dalam ruang lingkup pembahasan terdapat dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi dalam penulisan karya ilmiah berfungsi untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa atau objek yang akan dianalisa berdasarkan cakupan atau objek studinya. Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan terhadap serangan militer langsung Amerika Serikat terhadap Suriah pada tahun 2017. Dalam hal ini penulis melakukan analisa terhadap sikap Amerika Serikat dalam merespon konflik di Suriah.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam suatu karya tulis ilmiah digunakan untuk lebih membatasi jangka waktu objek kajian yang akan diteliti supaya data-data yang digunakan oleh penulis tetap sesuai dengan permasalahan yang dianalisa. Penulis akan menggunakan jangka waktu dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Tahun 2011 menjadi awal jangka waktu yang ditetapkan karena pada tahun 2011 adalah awal mula konflik Suriah yang terjadi antara pemerintahan rezim Bashar al-Assad dengan kelompok oposisi dan pemberontak dimana konflik tersebut menelan banyak korban jiwa dan menjadi perhatian dunia. Sedangkan tahun 2017, penulis

tetapkan karena pada tahun tersebut merupakan tahun dimana pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin presiden Donald Trump melakukan serangan langsung pertama kali ke Suriah dalam menyikapi konflik yang berlangsung di Suriah. Namun dalam batasan waktu, penulis tidak menutup kemungkinan menggunakan waktu diluar batasan yang sudah ditetapkan selama masih sesuai dan memiliki kaitan dengan kajian yang diteliti oleh penulis.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah ditujukan agar penulis dapat segera menemukan pemecahan masalah, sehingga pembahasan masalah akan tepat pada sasarannya. Dalam perumusan masalah diawali dengan munculnya suatu fenomena yang kemudia dikerucutkan dalam sebuah pertanyaan dan nantinya akan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk hipotesis. Berdasarkan pada identifikasi latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan penulis fokuskan pada karya ilmiah ini adalah:

“Mengapa Amerika Serikat melakukan serangan militer ke Suriah pada tahun 2017 ?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditentukan dari masalah yang diajukan dan inti dari tujuan penelitian berisikan tentang kontribusi hasil penelitian bagi kepentingan keilmuan. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui alasan apa saja yang menyebabkan Pemerintah Amerika Serikat melakukan serang militer langsung ke Suriah.

1.5 Landasan Teori/Konsep

Dalam setiap penulisan karya ilmiah perlu ditetapkan kerangka dasar teori yang berfungsi untuk membantu peneliti dalam menganalisa permasalahan yang diteliti. Kerangka dasar pemikiran bisa berupa konsep-konsep atau teori yang disusun secara sistematis untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian dan dalam melakukan analisa terhadap masalah yang diteliti.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan mengeksplorasi mengapa Amerika Serikat melakukan serangan militer ke Suriah. Oleh karena itu penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan kepentingan nasional dan teori intervensi militer

1.5.1 Teori Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional (*national interest*) adalah pondasi utama bagi teorinya tentang politik luar negeri serta hubungan internasional yang realis. Pendekatan Morgenthau ini sangat terkenal sehingga menjadikannya suatu paradigma yang begitu dominan dalam studi hubungan internasional setelah Perang Dunia ke II. Pemikiran Morgenthau berdasar pada premis bahwa strategi diplomasi suatu negara harus berdasarkan pada kepentingan nasional, bukan dengan alasan-alasan moral, legal ataupun ideologi yang dianggap oleh Morgenthau sebagai utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu hal – hal yang dapat membentuk dan juga mempertahankan pengendalian suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui cara – cara memaksa atau dengan cara kerjasama. Demikianlah Morgenthau menyusun konsep abstrak yang memiliki yang tidak mudah mudah untuk definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan hubungan internasional (Morgenthau H. J., 1951)

Kepentingan nasional memiliki fungsi sebagai penentu arah para pemimpin negara dalam menjalankan politik luar negerinya. Selain itu, kepentingan nasional juga berfungsi untuk tetap menjaga eksistensi negara baik untuk urusan dalam negeri serta urusan internasional. Fungsi – fungsi tersebut lah yang membuat teori kepentingan nasioanal sangat sesuai untuk memahami kebijakan Amerika Serikat dibawah pimpinan presiden Donald Trump yang memilih mengambil keputusan untuk mengintervensi Suriah demi menjaga eksistensinya di mata Internasional dan seakan menegaskan posisinya sebagai

negara adidaya dan paling aktif dalam dinamika konflik bersenjata internasional. Amerika Serikat juga ingin menunjukkan keseriusannya sebagai negara yang berpengaruh dalam upaya penegakkan hak asasi manusia dimana telah banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim presiden Bashar al-Assad selama konflik di yang terjadi di Suriah.

Menurut Jr. Bartholomees kepentingan nasional terdiri dari 4 aspek, yakni keamanan nasional, promosi nilai-nilai nasional, kepentingan ekonomi dan menciptakan tatanan negara yang menguntungkan bagi negara tersebut (Bartholomees, 2010, hal. 49-53).

1. Keamanan Nasional

Yaitu kepentingan untuk melindungi wilayah serta warga negaranya dari ancaman negara lain.

Pada poin ini keamanan nasional menjadi relevan untuk menjelaskan sikap AS di Suriah. Berkembangnya kelompok teror *Islamic State of Iraq Syria (ISIS)* menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. *ISIS* menargetkan simbol – simbol barat termasuk Amerika Serikat sebagai terget teror mereka. Amerika Serikat yang selalu gencar melawan terorisme sejak tahun 2001 lewat deklarasi *Global War on Terrorism*, merasa terancam dengan hadirnya *ISIS*. Suriah juga termasuk dalam daftar negara *axis of evil* melalui National Security Council (NSC) *Presidential Directive-17* yang diterbitkan pada Desember 2002 lalu (Dobson & Marsh, 2006, hal. 178). Dengan predikat tersebut Suriah menjadi salah satu negara yang dianggap oleh Amerika Serikat sebagai negara yang juga ikut mensponsori terorisme dan juga dicurigai mengembangkan senjata pemusnah massal. Sangat relevan jika aspek keamanan nasional termasuk dalam kepentingan nasional Amerikat Serikat di Suriah dalam perangnya melawan kelompok terorisme *ISIS* yang basis kekuatannya berada di Suriah dan Iraq. Dengan memberantas *ISIS* langsung di basis kekuasaanya, Amerika Serikat bertujuan untuk

melindungi negara dan warga negaranya yang selalu menjadi target teror dari kelompok – kelompok teroris seperti *ISIS*.

2. Promosi Nilai – Nilai Nasional.

Promosi nilai – nilai nasional adalah mempromosikan nilai – nilai yang dianut suatu negara agar dapat dianut dan digunakan oleh negara – negara lain.

Promosi nilai-nilai nasional seperti demokrasi dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dianut Amerika Serikat menjadi relevan sebagai niatan Amerika Serikat untuk ikut serta dalam konflik di Suriah. Amerika Serikat adalah negara yang menganut sistem demokrasi dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Promosi nilai – nilai nasional kurang relevan untuk menjelaskan kepentingan Amerika Serikat di Suriah karena Amerika Serikat sendiri masih berteman erat dengan negara Arab Saudi tidak menganut demokrasi.

3. Menciptakan Tatanan Negara yang Menguntungkan

Memiliki tujuan untuk membangun tata dunia di bidang keamanan dan ekonomi. Jika menciptakan tatanan negara yang menguntungkan telah tercapai maka kepentingan ekonomi akan lebih mudah tercapai.

Jika tujuan dalam poin ini sudah tercapai, maka sangat relevan untuk menjadi tujuan Amerika Serikat dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya di Suriah. Kepentingan Amerika Serikat dalam konteks ini adalah untuk menjaga keamanan internasional terlebih untuk kawasan di Timur Tengah. Timur Tengah menjadi penting karena menjadi jalur minyak yang menuju ke Eropa (AntaraNews, 21 September 2016). Jalur minyak dari Timur Tengah ke Eropa dan Asia pun terancam dengan adanya konflik di Suriah. Jika Bashar al-Assad lengser tentunya akan mengubah peta politik serta mengurangi pengaruh Russia dan Iran di Suriah.

Amerika Serikat akan semakin leluasa menancapkan kepentingan di Suriah dan Timur Tengah pada umumnya.

4. Kepentingan Ekonomi.

Untuk mencapai setiap kepentingan nasional diperlukan kestabilan ataupun peningkatan perekonomian negara.

Poin kepentingan ekonomi sangat relevan dalam menjelaskan kepentingan nasional AS di Suriah karena tuntutan untuk tersedianya pasokan minyak dan energi untuk konsumsi dalam negeri serta keberlangsungan hidup negara sekutu menjadi dasar respon Amerika Serikat terhadap konflik di Suriah. Segala cara akan ditempuh karena kebutuhan akan energi adalah kepentingan ekonomi yang penting bagi Amerika Serikat. Tidak memiliki pengendalian cadangan energi minyak dan gas akan meretas jalan menuju kehancuran bagi perekonomian Amerika Serikat yang menjadi sumber energi bagi perindustriannya (Bahar, 2004). Seperempat pendapatan Suriah berasal dari minyak, Suriah memiliki cadangan minyak yang melimpah dan menghasilkan 400.000 barel minyak bumi per hari (Samsa, 2017). Suriah menjadi jalur strategis distribusi minyak dari Timur Tengah menuju Eropa dan Asia, selain menjadi salah satu exportir minyak dunia. Amerika Serikat terkenal sebagai importir minyak dengan negara – negara Timur Tengah sebagai partner ekspornya.

Keempatnya merupakan aspek – aspek utama yang mempengaruhi dan memotivasi negara dalam mengupayakan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional. Merebaknya aksi teror serta konflik di wilayah Timur Tengah membuat Amerika Serikat perlu menjaga kestabilan keamanan wilayah Timur Tengah untuk melindungi para sekutu utamanya disana seperti Arab Saudi dan Israel serta untuk melindungi jalur minyak strategis di Timur Tengah. Jika kestabilan tersebut bisa dijaga, maka otomatis kepentingan ekonomi Amerika

Serikat akan kebutuhan energinya bisa terpenuhi dengan menguasai jalur minyak di Timur Tengah

Dalam *The Concept of Interest defined in Terms of Power*, Morgenthau menjelaskan bahwa konsep kepentingan nasional (*national interest*) yang didefinisikan sebagai *power* tersebut berada di antara nalar, akal atau *reason* yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan menggunakan fakta – fakta yang harus dipahami dan dimengerti. Morgenthau berusaha menjelaskan bahwa *power* adalah instrumen penting bagi sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Jemadu, 2008, hal. 67). Kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, dan *power* masing – masing saling berkaitan satu dengan yang lain. Semakin besar *power* yang dimiliki sebuah negara maka semakin besar peluang baginya untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional selalu tertuang dan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan luar negeri yang dianut negara tersebut. Singkatnya, Amerika Serikat sebagai negara *superpower* memiliki pengaruh yang sangat kuat diantara negara lainnya. *Power* yang dimiliki Amerika Serikat berguna untuk mendukungnya dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya di Suriah yang tercermin dari kebijakan luar negeri yang diambilnya.

Konsep kepentingan nasional akan digunakan untuk menjelaskan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Di satu sisi, kata kepentingan (*interest*) mengartikan kebutuhan yang sesuai dengan suatu standar yang digunakan, kemudian mengatasnamakan negara. Di sisi lain, kepentingan nasional juga digunakan untuk menjelaskan dan mendukung suatu kebijakan. Definisi kepentingan nasional tersebut yang akan digunakan untuk memahami alasan Amerika Serikat era Donald Trump memilih strategi tertentu dalam merespon konflik di Suriah. (Alex Mintz and Karl DeRouen, 2010, hal. 114)

1.5.2 Balance of Power

Balance of Power dalam perkembangannya memiliki berbagai definisi serta beragam pemisahan yang memiliki arti serta tujuan yang saling berlawanan dalam penerapannya seperti deskripsi, analisis, anjuran, dan propaganda

(Sheehan, 1996). Terlepas dari semua itu, *Balance of Power* merupakan salah satu gagasan paling penting dalam sejarah. Di luar semua kritik terhadap substansi konsep dari teori ini, kenyataannya *Balance of Power* menjadi teori yang tetap dipakai oleh ilmuwan HI untuk menganalisis fenomena di abad ke-21 dalam berbagai bentuk dan intensitas (T. V. Paul, 2004). Salah satu contohnya adalah konsep *Balance Of Power* dilihat dari sudut pandang sistemik dan sub-sistemik.

Level sistemik yang dimaksud dalam *Balance of Power* adalah sistem internasional secara global. Konstelasi perimbangan kekuatan dilihat secara menyeluruh antar negara-negara di dunia yang merupakan bagian dari sistem internasional. Karena tujuan akhir dari *Balance of Power* adalah tercapainya perdamaian. Kaum liberalis menawarkan alternatif lain agar perdamaian yang diimpikan dapat tercapai. Kaum liberalis berpendapat bahwa setiap negara harus tunduk dan patuh pada norma hubungan antar negara. Agar norma tersebut dapat dipatuhi, maka harus ada legitimasi dari sebuah kekuatan di atas negara yaitu lembaga internasional.

Teoritikus *Balance of Power* kontemporer sepakat bahwa legitimasi adalah hal esensial dalam menjaga perdamaian. Akan tetapi, karena masih ada aktor-aktor yang bertindak melawan norma atau bahkan menggunakan institusi internasional untuk mencapai kepentingannya sendiri, *Balance Of Power* masih menganggap balancing adalah hal yang penting untuk menciptakan perdamaian (T. V. Paul, 2004). *Balance of Power* pada level sistemik dicirikan oleh peran legitimasi yang mendorong setiap aktor dalam HI untuk melawan segala tindakan baik dari single atau coalition actors yang cenderung mengambil posisi dominan dalam sistem. Dalam situasi dunia yang lebih “beradab” seperti sekarang, setiap negara berdaulat memiliki hak yang sama untuk tetap ada tanpa memandang ukuran maupun *power* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, kondisi equilibrium in power sangat penting untuk mencegah munculnya “lawless situation” (T. V. Paul, 2004). Kontestasi *Balance of Power* pada dinamika sistem politik global juga berlaku pada level sub-sistemnya. *Balance Of Power* pada level ini menggambarkan kondisi perimbangan konstelasi *power* pada tingkat regional/kawasan. Peningkatan kekuatan sebuah negara, maupun koalisi beberapa

negara di kawasan, menjadi penyebab munculnya masalah. Ketika aktor, atau koalisi dari aktor-aktor memiliki terlalu banyak kekuatan militer di kawasan, aktor tersebut dapat melakukan tindakan yang agresif dan merugikan negara di sekitarnya. Untuk menanggulangnya, koalisi negara-negara di kawasan dapat melakukan perimbangan dengan, atau tanpa, melibatkan kekuatan dari (T. V. Paul, 2004).

Balance of power sebagai kolektif reaksi untuk mencegah terbitnya satu kekuatan dominan yang berpotensi mendesak yang lemah. Suatu penyusunan hubungan sehingga tidak akan ada negara yang berada pada posisi lebih kuat di atas negara-negara lainnya. Seperti halnya poin ketiga yang mana *balance of power* sebagai kolektif reaksi karena adanya kesadaran bersama untuk menghindari munculnya negara yang terkuat di antara yang lainnya.

Balance of Power beroperasi melalui aliansi-aliansi yang tidak memberi peluang adanya satu dominan power yang tumbuh lebih kuat sehingga berpotensi mengancam keamanan yang lain. *Balance of power* sebagai strategi untuk menciptakan stabilitator regional melalui keikutsertaan dalam aliansi maupun kelompok kerjasama keamanan yang kolektif.

Dalam hal ini, keterlibatan Amerika Serikat di konflik Suriah merupakan *Balance of Power* bagi kekuatan Rusia dan Iran dalam melakukan pengawasan keamanan di kawasan. Hal tersebut ditandai dengan optimalisasi serangan udara masing-masing angkatan bersenjata ke wilayah ISIS. Rusia dan Iran telah menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat, dimana Iran memiliki persetujuan dengan Amerika Serikat terkait isu nuklir dan Rusia yang merupakan rival Amerika Serikat sejak era perang dingin. Jika ditinjau dari pengertian tersebut maka Rusia dan Iran jelas menjadi ancaman kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah. Dimulai dari ancaman kedaulatan, ancaman ekonomi, hingga ancaman hegemoni. Pada akhir tahun 2017, Rusia kedatangan menambah kekuatan angkatan lautnya di Laut Mediterania dekat Suriah (Liputan6, 2017). Selain itu, Rusia melakukan serangan bom udara ke Suriah bagian selatan. Organisasi pengawas yang berbasis di Inggris itu menyebut setidaknya terdapat 25 serangan yang dilakukan Rusia terhadap daerah pemberontak. (CNN Indonesia, 2017).

1.6 Argumen Utama

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, untuk menjawab permasalahan dan mengetahui apa yang menjadi landasan Amerika Serikat dalam mengintervensi Suriah maka penulis berpendapat bahwa argumentasi utama adalah Amerika Serikat masuk dalam konstelasi konflik di Suriah dengan tujuan memberantas terorisme, menjaga stabilitas keamanan di Timur Tengah, memastikan ketersediaan pasokan energi bagi konsumsi negaranya terpenuhi, serta membendung pengaruh Rusia dan Iran yang pro terhadap rezim Bashar al Assad sehingga dapat menciptakan Balance of Power di Suriah.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kerangka konseptual yang berlaku supaya suatu karya tulis ilmiah dapat dipertanggung jawabkan di hadapan ilmu pengetahuan dengan cara menganalisa data sesuai dengan tujuan yang dituju. Dalam perumusan penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif yang berarti menggunakan teori/konsep sebagai pemandu fokus penelitian. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang fokus kepada individu, group, komunitas dan kejadian tertentu. Teknik dalam penelitian ini mencakup dua cara yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Data yang digunakan oleh penulis merupakan data sekunder yang berarti penulis tidak berinteraksi langsung dengan objek yang dikaji. Rujukan pustaka yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Buku-buku koleksi pribadi
4. Media internet

1.7.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mempermudah penulis untuk mengolah informasi sehingga data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang ilmiah serta objektif. Ada pun teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif-kualitatif. Teknik tersebut akan membantu penulis untuk menggambarkan fenomena dan memahami fenomena tersebut lebih objektif.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam karya tulis ilmiah ini akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan poin – poin penting menjadi alasan - alasan dasar penulis dalam menyajikan tema atau judul sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam. Poin – poin penting yang akan dijabarkan tersebut meliputi latar belakang, lingkup pembahasan (batasan materi dan batasan waktu), rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori/konsep, argumen utama, metode penelitian (pengumpulan data dan metode analisis data), dan sistematika penulisan.

BAB 2 Konflik di Suriah

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang profil negara Suriah dari awal dinasti Assad berkuasa hingga sampai terjadinya konflik Suriah secara garis besar dan mendalami agar dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi di Suriah hingga menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan.

BAB 3 Sikap Amerika dalam merespon konflik di Suriah

Pada bab 3 penulis akan menjelaskan bagaimana respon yang diberikan Amerika Serikat dalam menyikapi konflik di Suriah kemudian akan dijelaskan tindakan lebih lanjut yang ditempuh Amerika Serikat di Suriah.

BAB 4 Alasan Amerika Serikat menyerang Suriah secara langsung

Pada bab 4 ini akan diberikan pemaparan tentang alasan apa saja yang melatarbelakangi dan menjadi alasan Amerika Serikat untuk memberi respon ke Suriah dengan menyerang Suriah secara militer.

BAB 5 Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari uraian yang telah dituliskan pada bab – bab sebelumnya sekaligus menjadi bab penutup dari keseluruhan penelitian ini.



BAB 2. KONFLIK DI SURIAH

2.1 Awal Kepemimpinan Dinasti Assad Hingga Kepemimpinan Bashar al Assad

Suriyah adalah salah satu negara di Timur Tengah dan memiliki nama resmi Republik Arab Suriyah (*The Syrian Arab Republic*). negara yang terletak di Timur Tengah dan beribukota di Damaskus. Suriyah mulai diperhitungkan keberadaannya pasca perang teluk dimana dengan campur tangan Suriyah turut menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Sebelum tahun 1918 Suriyah lebih dikenal dengan sebutan Syam. Wilayahnya mencakup seluruh wilayah yang sekarang menjadi negara Suriyah, Palestina, Lebanon, Israel, dan Yordania. Letak geografis Suriyah yang strategis ini menjadi perhatian negara – negara yang bertetangga dengan Suriyah baik yang bersahabat dengan Suriyah maupun tidak, khususnya yang memiliki kepentingan terhadap Suriyah.



Gambar 2.1. Wilayah Suriyah

Sumber : <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/12/03/30/m1okak-dua-wartawan-tewas-di-perbatasan-suriyah>

Gambar 2.1 menunjukkan letak geografis Suriah yang berbatasan dengan Turki di sebelah utara, dengan Iraq di sebelah timur, dengan Yordania di sebelah selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Tengah seperti. Negara ini memiliki luas wilayah 185.180 km², termasuk dataran tinggi Golan yang diduduki Israel seluas 1.295 km²..

Suriah yang berpenduduk 22,5 juta jiwa (2013) ini merdeka pada tahun 17 April 1946. Semenjak kemerdekaannya, Suriah mempunyai satu partai politik yang sangat berkuasa yakni partai Ba'ath. Suriah dipimpin dinasti Assad semenjak 22 Februari 1971, diawali oleh Hafez al Assad dan berlanjut ke anaknya Bashar al Assad yang diangkat menjadi Presiden pada 17 Juli 2000. Hafez al Assad sebelum menjadi Presiden, dulunya adalah anggota militer angkatan udara Suriah dan anggota pendiri partai Ba'ath. Hafez Al Assad menjabat selama lebih dari 30 tahun dan menjalani 3 kali masa jabatan berturut – turut. mulai dari 22 Februari 1971 sampai Juni 2000. Selama menjabat sebagai pemimpin Suriah, Hafez Al Assad menjadi pemimpin yang disegani dan mampu mengambil hati masyarakat Suriah. Kehebatannya menjadi pemimpin di Suriah terlihat dari caranya mengambil keputusan serta kebijakan. Hafez al Assad juga sangat berhati – hati dalam mengeluarkan pernyataan, hal itulah yang menjadikannya tokoh yang berpengaruh di Timur Tengah (Subekti, 2014).

Suriah mengklaim dirinya sebagai negara Republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial dimana kekuasaan eksekutif akan dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Hal ini memudahkan Hafez al Assad mencalonkan penerusnya melalui partai Ba'ath yang tak lain adalah anaknya sendiri, Basil al Assad. Setelah kesehatannya menurun, Hafez al Assad mulai mempersiapkan anak tertuanya tersebut untuk menggantikan dirinya untuk menjadi Presiden Suriah. Namun Basil al Assad meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan mobil pada tahun 1994. Kematian Basil al Assad membuat adiknya, yang tak lain adalah Bashar al Assad menjadi calon tunggal untuk menggantikan Hafez al Assad yang sudah menurun kesehatannya. Bashar al Assad dipanggil pulang ke Suriah dari masa studinya di London dan mulai

dilibatkan dalam kepengurusan partai Ba'ath dan diangkat menjadi pemimpin divisi lapis baja angkatan darat Suriah.

Karir militer Bashar al Assad melaju cepat, Bashar al Assad mulai masuk akademi militer pada tahun 1994 namun sudah berpangkat Brigadir Jendral pada tahun 2000 saat ayahnya, Hafez al Assad meninggal. Ketika posisinya sudah kuat, Bashar al Assad mulai menyingkirkan para perwira yang dianggapnya akan menjadi pesaingnya dan juga para perwira korup. Dibawah kepemimpinan Bashar al Assad, pemerintahan Suriah diisi oleh orang – orang yang loyal terhadap Bashar al Assad. Posisi – posisi penting di pemerintahan kerap diisi orang – orang dari militer dan elite politik yang dipercaya oleh Bashar al Assad. Hal ini membuat kekuasaan Bashar al Assad di Suriah sangatlah kuat dan sulit dipisahkan dengan militer. Bashar al Assad mempunyai lawan – lawan politik selama memimpin Suriah, namun ia tidak memiliki lawan oposisi yang benar – benar tangguh. Satu – satunya oposisi yang bisa dibilang kuat sebenarnya adalah Ikhwanul Muslimin. Mereka merupakan pihak yang nantinya pihak awal yang mengobarkan api musim semi di Suriah. (Misrawi, 2018)

Suriah dibawah kepemimpinan Bashar al Assad melakukan transisi serta transformasi dari sistem ekonomi yang sentralis berganti menjadi ekonomi pasar terbuka. Transisi ekonomi Suriah berjalan baik dan Suriah mengalami kemajuan ekonomi saat masa-masa awal transisi dimana Suriah bisa menjalin kerja sama dengan negara-negara luar seperti Russia, China dan Iran. China yang menjadi rekanan kerja sama Suriah menjadi rekanan bisnis terbesar dengan menyumbang pemasukan \$2,4 juta dollar AS dari ekspor minyak (Rosyada, Keberhasilan Bashar Al-assad dalam Mempertahankan Kekuasaannya di Suriah, 2017). Assad juga berhasil mengangkat Human Development Index (HDI) di Suriah, versi PBB berada dalam urutan 111. HDI merupakan penilaian atas keberhasilan dalam pembangunan di sebuah negara yang berpatokan pada sejumlah variabel, seperti pendapatan penduduk, angka harapan hidup, angka melek huruf, dan tingkat pendidikan (Dina Y. Sulaeman, 2013). Namun perekonomian Suriah dikuasai oleh orang – orang dekat Bashar al Assad dan menghasilkan budaya korupsi yang melekat pada pemerintahan Bashar al Assad. Hal tersebut mengakibatkan

kesulitan ekonomi yang di alami rakyat Suriah mengeluh akan tingginya angka pengangguran, korupsi di kalangan pegawai negeri dan tak adanya kebebasan politik (BBC News, 2018). Hal ini ditambah lagi dengan legitimasi politik Presiden Bashar al Assad ketika memimpin Suriah yang cenderung mengalami kemerosotan dari tahun ke tahun diakibatkan dari tiga persoalan utama yakni otoritas (*authority*), identitas (*identity*), dan persamaan (*equality*) (Hudson, 1977, hal. 4). Jika dilihat dari segi otoritas, Presiden Assad memang terpilih melalui pemilihan umum, tapi pada saat itu tidak ada calon lain dan Bashar al Assad menjadi calon tunggal pewaris tahta ayahnya. Sementara dari segi identitas, Bashar al Assad berangkat dari kelompok shiah alawiyah yang di Suriah hanya menjadi sebagian kecil dari mayoritas penduduk Suriah yang beragama Islam sunni dan dari segi persamaan, baik Hafez al Assad maupun Bashar al Assad sama-sama membedakan perlakuan kepada masyarakat yang beragama Islam shiah dan Islam sunni. Ketiga hal itulah yang kemudian membuat rakyat Suriah menuntut adanya pergantian rezim.

2.2 Awal Mula Konflik di Suriah

Perubahan konstelasi politik di negara - negara Timur Tengah mulai yang bergejolak pada akhir 2010 semakin memanas dan mendapatkan perhatian global. Peristiwa yang dikenal dengan istilah *Arab Spring* atau musim semi demokratis yaitu sebuah revolusi negara – negara di Timur Tengah untuk menjatuhkan rezim yang otoriter dan menciptakan pembaharuan tatanan negara. Tuntutan dilakukan rakyat kepada pemerintahan yang berkuasa dengan membawa tujuan yaitu menuntut adanya perubahan secara fundamental terhadap pemerintahan dan menuntut dikembalikannya kekuasaan ke tangan rakyat. Revolusi di tanah Arab atau *Arab Spring* diawali dari pergolakan rakyat di Tunisia, lalu menyebar ke negara – negara Arab lainnya seperti Mesir, Aljazair, Bahrain, Yaman, Libya serta negara – negara Timur Tengah lainnya termasuk di Suriah yang akhirnya jadi konflik berkepanjangan.

Arab spring yang juga berkobar di Suriah diawali dengan penangkapan sekelompok pelajar oleh kepolisian Suriah karena melakukan tuntutan dengan

menuliskan propaganda anti pemerintah di tembok – tembok kota. Sekelompok pelajar tersebut ditahan oleh kepolisian Suriah lalu tersiar kabar di tengah masyarakat bahwa mereka di siksa selama menjalani masa penahanan. Mengetahui adanya tindak penyiksaan yang dilakukan kepolisian, masyarakat Suriah melakukan demonstrasi sebagai aksi protes terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian Suriah pada tanggal 11 Maret 2011 di kota Daraa (Sulaiman, 2013). Aparat keamanan Suriah berusaha membubarkan aksi demonstran hingga melepaskan tembakan ke arah para demonstran. Setelah kejadian penembakan ke arah para demonstran pada tanggal 11 Maret 2011, muncul lagi aksi demonstrasi pada tanggal 23 Maret 2011 di kota Daraa, aparat keamanan kembali menggunakan tindakan represif untuk membubarkan demonstrasi, kali ini memakan korban nyawa beberapa demonstran dikabarkan tewas akibat tindakan aparat tersebut. Penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat keamanan untuk menghadapi aksi demonstran memicu demonstrasi nasional di kota – kota lainnya di Suriah. Aksi pada tanggal 25 maret 2011 setelah sholat jum'at tersebut menentang presiden Bashar al Assad beserta partai Ba'ath-nya yang berkuasa. (VOA Indonesia, 8 Maret 2011)

Meski Presiden Bashar al Assad menyatakan bahwa pemerintahannya mempertimbangkan untuk melakukan reformasi politik termasuk menghapuskan pembatasan partai politik dan juga menghapus hukum darurat Suriah yang sudah diterapkan selama 48 tahun, tetapi aksi demonstrasi yang menuntut dirinya mundur terus berjalan dan semakin bertambah banyak meski aparat keamanan berusaha membubarkan demonstrasi tersebut (BBC News, 2011). Aksi demonstrasi yang menuntut mundurnya presiden Bashar al Assad juga mendapatkan perlawanan dari rakyat Suriah yang pro terhadap pemerintah yang juga melakukan demonstrasi besar – besaran di ibukota Damaskus.

Sikap keras terhadap pemerintah membuat dukungan terhadap oposisi meningkat di Suriah. Akibat tindakan kekerasan yang semakin meningkat di Suriah, rakyat Suriah yang mendukung oposisi dan pro-demokrasi mulai mengangkat senjata untuk melawan aparat keamanan yang bertindak represif. Presiden Bashar al Assad menyampaikan pidato di depan dewan legislatif suriah

untuk meredakan situasi yang berkejolak di negrinya. Assad mengatakan bahwa protes yang terjadi karena ditunggangi oleh asing, Bashar al Assad juga menyatakan bahwa dirinya berjanji untuk menghancurkan terorisme yang didukung pihak asing dan memulihkan kontrol atas negaranya (BBC Indonesia, 2018). Tingginya angka kekerasan termasuk penangkapan 15 pelajar yang juga disiksa aparat Suriah, membuat Suriah terjebak ke dalam perang saudara (Arromadloni, 2017) . Sekaligus menandakan awal mula konflik panjang yang terjadi di Suriah karena para pemberontak dan pendukung oposisi membentuk ratusan barikade untuk melawan pasukan Suriah.

Ditengah gencarnya tuntutan untuk mundur, Presiden Bashar al Assad tetap berusaha mempertahankan jabatan dan kekuasaanya. Bashar al Assad tetap berupaya untuk meredakan protes dan aksi demonstrasi yang membuat stabilitas di negrinya menjadi kacau. Presiden Bashar al Assad pun mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan masyarakat yang akan melaksanakan demonstrasi untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah Suriah. Menteri dalam negeri yang baru diangkat oleh Presiden Bashar al Assad menyerukan agar rakyat Suriah tidak melakukan aksi demonstrasi dan berkata bahwa pemerintah akan terus menganggap aksi demonstrasi sebagai ancaman nasional (Arromadloni, 2017).

Demonstrasi yang semakin sporadis dan dilaksanakan secara besar – besaran di seluruh penjuru Suriah tidak membuat Bashar al Assad mundur. Pemerintah Suriah tetap bergeming menghiraukan tuntutan mundur dari demonstran dan mengaitkan kerusuhan yang terjadi di negaranya dikarenakan ada campur tangan pihak asing dan ketegangan sektarian. Pada bulan Mei 2011, pertempuran telah mencapai di ibukota Damaskus dan kota kedua terbesar di Suriah, Aleppo. Pada saat itu konflik bukan lagi antara kubu pemberontak oposisi pro-demokrasi dengan pasukan pemerintah Suriah, namun konflik juga meluas menjadi perang sektarian di negara yang awalnya dikenal sekuler antara kaum mayoritas Sunni melawan kaum minoritas Syi'ah Alawi yang di anut presiden Bashar al Assad. Pengkotak – kotakan semacam itu semakin mendorong kedua belah pihak untuk melakukan tindakan kekerasan yang bukan hanya

mengakibatkan hilangnya nyawa dari kedua belah pihak, namun juga menghancurkan komunitas dan semakin membuat harapan untuk mengakhiri konflik menjadi semakin sulit (BBC Indonesia, 2018).

Menyusul aksi demonstran anti pemerintah di Damaskus pada bulan Mei 2011, aparat keamanan Suriah menanggapi dengan aksi kekerasan dan mendirikan barikade keamanan di beberapa pinggiran kota Damaskus sebagai upaya untuk membatasi gerakan para demonstran. Setelah insiden tersebut, Suriah mendapatkan kecaman dari Uni Eropa (EU) dan dijatuhi sanksi berupa pelarangan berkunjung ke negara – negara UE dan pembekuan aset terhadap beberapa pejabat senior di pemerintahan Suriah yang diindikasikan ikut bertanggung jawab dalam konflik yang terjadi di Suriah. Selain itu Uni Eropa menerapkan embargo senjata untuk Suriah. Suriah juga semakin terisolasi dari sekutu regionalnya. Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan juga mengutuk penggunaan kekerasan terhadap rakyat Suriah yang pro-demokrasi. Turki juga menjadi negara yang memfasilitasi para oposisi untuk mengadakan konferensi pers (Britannica, 2018).

Dengan adanya dukungan dari Turki yang pro terhadap oposisi tersebut banyak warga Suriah melarikan diri ke Turki dan menjadi pengungsi di sana. Rezim Bashar al Assad terus menggunakan tindakan kekerasan untuk menghadapi para demonstran dan pemberontak pada bulan Juli dan Agustus. Aparat Keamanan Turki juga melancarkan serangan militer ke beberapa kota seperti Hammah dan Latakia. Konflik di Suriah yang banyak memakan korban nyawa dan menuai kecaman dari dunia internasional yang terus mendesak presiden Bashar al Assad untuk mundur dari jabatan kepala negara yang diembannya. Menanggapi insiden tersebut pihak militer Suriah melancarkan serangan dengan melibatkan artileri berat yang berakibat ribuan warga melarikan diri dan melintasi perbatasan Turki. Rezim Assad juga terus menggunakan aksi kekerasan terhadap para pengunjuk rasa di bulan Juli dan Agustus 2011, serta melancarkan serangan militer terhadap sejumlah Kota termasuk Hammah dan Latakia. Pertumpahan darah yang terjadi di Suriah juga terus menuai kecaman dari internasional yang menyerukan Bashar al Assad agar mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Pemerintahan Suriah menyetujui seruan Liga Arab untuk menghentikan kekerasan

terhadap para demonstran dan menarik mundur pasukan serta pasukan artileri berat berupa tank dan kendaraan lapis baja dari kota – kota, dan membebaskan para tahanan politik pada awal November 2011. Melunaknya sikap Suriah rupanya hanya sebagai taktik untuk mengulur waktu, karena sehari setelahnya kekerasan kembali terjadi di kota Homs (Britannica, 2018).

Di bulan Februari 2012 Liga Arab dan PBB (Persatuan Bangsa – Bangsa) menunjuk mantan sekretaris jenderal PBB, Koffi Annan sebagai utusan perdamaian untuk Suriah. Pada bulan yang sama, tentara Suriah gencar melancarkan kota Homs dengan membombardir kota yang dikuasai pemberontak dan oposisi selama beberapa minggu. Gencatan senjata yang disuarakan PBB dapat mengurangi angka kekerasan pada pertengahan April. Namun gencatan senjata hanya berlangsung beberapa hari, karena setelahnya terjadi konflik antara pasukan pemerintah dengan kubu pemberontak. PBB memilih untuk menghentikan kegiatan pemantauannya di Suriah pada bulan Juni 2012 dikarenakan alasan keamanan. Pada bulan Agustus 2012, Koffi Annan mengundurkan diri sebagai utusan perdamaian untuk Suriah yang ditunjuk PBB, penggantinya adalah seorang diplomat asal Aljazair, Lakhdar Brahimi (Arromadloni, 2017).

Pertempuran makin meningkat tiap hari di Suriah dan menyebabkan semakin tingginya korban dari masyarakat sipil berpotensi melanggar HAM dan PBB. Menurut laporan PBB, tentara dan pasukan keamanan Suriah bertanggung jawab untuk sebagian pelanggaran hak asasi manusia sejak Maret 2011. Laporan penyelidikan PBB menyebut konflik semakin lama semakin berubah menjadi perang militer dimana mereka yang berkonflik mulai menggunakan kekuatan militer berat dan diperkirakan 9000 orang telah tewas semenjak konflik pecah pada Maret 2011 hingga Mei 2012 (BBC, 24 Mei 2012). Babak baru terjadi dalam konflik di Suriah setelah adanya dugaan Suriah menggunakan senjata kimia untuk memukul mundur para pemberontak. Hal itu terjadi pada tanggal 21 Agustus 2013 ketika roket – roket militer Suriah menghantam kawasan Ghouta. Menurut Koalisi Nasional, gabungan kelompok oposisi, setidaknya 650 orang tewas dalam serangan besar – besaran tersebut (BBC, 21 Agustus 2013). Kejadian tersebut memantik kecaman dari dunia internasional dan juga PBB. Amerika Serikat,

Inggris, dan Perancis mengecam keras pemerintahan Suriah yang menggunakan senjata kimia dan berencana melakukan aksi militer sebagai respon mereka. PBB pun mendesak harus dilakukan penyelidikan untuk merespon serangan militer Suriah tersebut. Meski mengalami perdebatan yang alot dengan pemerintah Suriah, utusan PBB akhirnya diberi ijin untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia oleh pasukan keamana Suriah di beberapa lokasi.

Pada akhirnya PBB melalui Dewan Keamanan mengesahkan resolusi yang memerintahkan penghancuran senjata kimia Suriah dibawah kontrol Internasional. Resolusi tersebut merupakan resolusi pertama yang dikeluarkan oleh DK PBB semenjak konflik di Suriah dimulai. Negara – negara DK PBB juga mengecam keras serangan gas beracun pada Agustus 2013 yang banyak memakan korban dan dilaporkan oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa korban akibat serangan tersebut mencapai 1400 orang (Detik News, 28 September 2013).

Intervensi kekuatan Regional (pihak oposisi, ISIS, Front al-Nusra, dan pihak lain yang ikut melawan pemerintahan Bashar al Assad) dan kekuatan Internasional (Amerika Serikat, Russia, Iran, Turki, Arab Saudi, serta negara lainnya yang ikut mengintervensi Suriah) di dalam konflik Suriah memberikan kontribusi pada awal mula konflik di Suriah. Amerika Serikat, Arab Saudi, Iran, dan Russia dengan dukungan militer, finansial, dan politik mereka untuk kubu oposisi dan kubu pemerintah Suriah memberikan intensifikasi dan kelanjutan dari awal konflik di Suriah menjadikan Suriah sebagai medan pertempuran proxy. Hal tersebut menjadi semakin kompleks setelah kaum jihad juga masuk ke dalam pusaran konflik di Suriah dan menambah dimensi di level lebih lanjut pada konflik tersebut. Front al-Nusra yang memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda juga ikut bertempur di Suriah.

Front al-Nusra dianggap sebagai kelompok yang efektif dan agresif untuk melawan pemerintahan Suriah karena telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah barat laut Suriah. Negara – negara barat yang sangat alergi dengan Al-Qaeda ataupun cabang – cabangnya serta kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda menganggap bahwa Front al-Nusra adalah jaringan teroris. Konflik di Suriah juga diperparah dengan munculnya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*)

mulai April 2013, mereka bergabung dengan Front al-Nusra untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad (BBC, 25 Juli 2014). ISIS mulai bertempur melawan pasukan keamanan Suriah dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah timur Suriah. Pada akhir bulan Juni 2014 setelah menguasai beberapa kota, ISIS menyatakan mendirikan khalifah yang wilayah mencakup Mosul, Tikrit, Falluja, dan Tal Afar di Irak serta Raqqa di Suriah dan mengubah nama menjadi Daulah Islamiyah.

Pendirian khalifah di wilayah Suriah oleh ISIS menuai kecaman dari kelompok oposisi dan juga termasuk Front al-Nusra. Hingga akhirnya ISIS juga menciptakan "perang dalam perang" melawan kelompok oposisi dan Front al-Nusra. Kelompok lain yang terlibat adalah pejuang Kurdi yang dibantu Amerika Serikat di Suriah Utara. Pada 2015, Russia mulai mengebom beberapa wilayah di Suriah yang dikuasai teroris dan pemberontak untuk membantu Bashar al-Assad. Dengan bantuan gerakan Hizbullah dari Lebanon serta Iran semakin menyulitkan perang berakhir. Russia juga membantu merebut kota Aleppo pada Desember 2016 yang merupakan markas utama oposisi dan diklaim kemenangan terbesar Russia di Suriah dalam upayanya membantu pemerintahan Bashar al-Assad.

Banyaknya aktor eksternal yang mengintervensi di Suriah serta kompleksitas permasalahan di Suriah menjadi faktor kunci dari konflik di Suriah. Penyebab konflik di Suriah bisa diuraikan dari legitimasi politik pemerintahan Bashar al Assad yang sudah tidak dipercaya oleh masyarakat Suriah, konflik sektarian, serta munculnya kelompok teroris *ISIS*. Konflik di Suriah semakin sengit setelah banyak aktor eksternal seperti Russia, Amerika Serikat, Iran yang ikut mencampuri urusan dalam negeri Suriah. Kompleksitas permasalahan tersebut menjadi penyebab konflik di Suriah menjadi konflik berkepanjangan hingga menelan banyak korban jiwa dan tidak kunjung usai. Amerika Serikat yang ikut mengintervensi urusan dalam negeri Suriah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani konflik di Suriah yang akan dijelaskan di BAB III.

BAB 3.

SIKAP AMERIKA TERHADAP KONFLIK DI SURIAH

3.1 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah

Timur tengah menjadi fokus utama dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) terutama sejak tragedi serangan teroris 11 September 2001. Sebenarnya jauh sebelum tragedi serangan teroris Timur tengah sudah menjadi perhatian AS semenjak perang dingin dan perang teluk. Akan tetapi peristiwa serangan teroris 11 September 2001 membuat AS menjadikan Timur tengah menjadi area utama orientasi kebijakan luar negeri AS. apabila kebijakan sebelum 9/11 dikarenakan rivalitas AS dengan Uni Soviet untuk menguasai wilayah Timur tengah maka setelah peristiwa 11 September 2001 orientasi kebijakan AS ke Timur tengah jauh meluas tidak hanya kepada negara akan tetapi juga kepada organisasi-organisasi yang dianggap sebagai terorisme (Meehan, 2005).

Kemajuan ekonomi dan industrialisasi Amerika Serikat untuk menyaingi Uni Soviet pasca perang dunia ke II membuat AS membutuhkan pasokan energi yang besar untuk industri dalam negerinya. Timur Tengah yang merupakan pemasok energi di dunia menjadi fokus AS untuk memenuhi kebutuhan energinya. Selain itu letak geostrategis negara-negara Timur tengah yang berada pada jalur dagang terusan Suez dan selat Gibraltar serta jalur utara lautan Hindia menjadi motif utama Timur tengah menjadi fokus dari kebijakan AS. Setelah terjadinya peristiwa 9/11 membuat kebijakan luar negeri AS di Timur tengah semakin meluas dengan adanya kebijakan *War on Terror* yang menjadi landasan AS untuk menyerang Iraq, mencegah Iran mengembangkan senjata nuklirnya, serta mendukung perubahan untuk mencapai demokrasi di negara Arab (Syelvia, 1 Desember 2012). Dalam beberapa kebijakannya di Timur Tengah, AS beranggapan sesuai dengan norma liberalisme (demokrasi, kerjasama ekonomi) yang diyakini AS akan dapat membuat Timur tengah stabil dan tidak menjadi tempat yang memberikan ruang penuh pada ekstrimis dan fundamentalis yang berbahaya pada keamanan global (Bowman, 2005). Namun demikian dengan

status sebagai negara *super power* disatu sisi dan negara demokrasi disisi lain membuat perumusan politik luar negeri AS selalu dipengaruhi isu-isu global disatu sisi dan opini publik domestik serta konstelasi politik domestik disisi lain. Tinjauan konsepsi, rezim demokratis memiliki kecenderungan politik luar negeri yang positif sebagai konsekuensi logis dari orientasi rezim demokrasi yang selalu mengacu pada nilai dasar dan ekonomi, sosial, politik yang sedang berkembang di dalam (domestik) maupun lingkungan internasional. implikasinya, kebijakan luar negeri selalu berimplikasi terhadap stabilitas regional dan internasional (Perwinta, 2007). Amerika Serikat pada konteks kebijakan luar negerinya juga didasarkan pada nilai-nilai yang dipercaya seperti demokrasi, pasar bebas dan keamanan global.

Tabel 3.1 Doktrin Presidensial Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pasca-Perang Dunia II

| Tahun | Doktrin Presidensial | Deskripsi |
|-------|----------------------|---|
| 1947 | Doktrin Truman | Komitmen AS untuk mendukung pemerintah negara lain dalam menghadapi gerakan subversi internal maupun eksternal |
| 1957 | Doktrin Eisenhower | Mendeklarasikan Timur Tengah sebagai kawasan vital bagi AS |
| 1969 | Doktrin Nixon | Mengalihkan keterlibatan AS ke Asia untuk membantu sekutu dalam menangkal ideologi Komunisme di negara-negara sekutu. |
| 1985 | Doktrin Reagan | AS menjanjikan negara sekutu untuk melawan Komunisme dengan membuat kelompok pemberontak (<i>insurgent or freedom fighters</i>) |
| 1994 | Doktrin Clinton | Identifikasi dan menyebarluaskan paham demokrasi melalui kebijakan luar negeri AS |
| 2002 | Doktrin Bush | Pertahanan preventif terhadap gerakan Terorisme Global sebagai strategi utama AS |
| 2009 | Doktrin Obama | Era baru dalam membangun hubungan kerjasama berdasarkan kepentingan dan kehormatan bersama |

Sumber: Herry Wahyudi. Standar Ganda Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kudeta Mesir 2013. Dalam *Insignia Journal of International Relations*. Vol. 5, No. 1, April 2018, 1-14

Berdasarkan tabel 3.1 Kebijakan luar negeri AS memiliki perbedaan antara kebijakan luar negeri pasca perang dunia, saat perang dingin dan dengan era setelah kejadian 9/11. Kebijakan AS pasca perang dunia terutama dalam doktrin Eisenhower, AS lebih menekankan pada penguasaan energi untuk ketahanan energi dalam negeri AS dan mendeklarasikan kawasan Timur Tengah sebagai kawasan vital bagi AS. Sedangkan saat perang dingin, kebijakan luar negeri AS lebih condong ke perebutan pengaruh antara AS dengan Uni Soviet sehingga kebijakan AS di Timur tengah lebih banyak untuk membendung pengaruh politik Uni Soviet seperti membendung Komunisme yang menguat di Timur tengah dengan kampanye pasar bebas di Timur tengah, seperti yang disebutkan dalam doktrin Nixon dan doktrin Reagan.

Berbeda dengan orientasi kebijakan AS di kawasan Timur tengah pasca peristiwa 9/11 AS dibawah pemerintahan George Bush Jr. mengorientasikan kebijakan luar negeri AS pada perlawanan terhadap terorisme (*war on terror*). Orientasi kebijakan counter-terorisme yang dicanangkan bush menggunakan strategi *political-security partnership* melalui aliansi AS dengan negara-negara Timur tengah terutama negara teluk (Wahyudi, 2018). Pada pemerintahan George W Bush misalnya, AS melakukan invasi ke Afganistan untuk melawan jaringan Al Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. Begitu juga dengan serangan invasi AS ke Irak yang ditengarai memiliki senjata pemusnah massal. Tujuan dari invasi adalah promosi nilai-nilai liberalisme AS yaitu demokratisasi, keterbukaan ekonomi dan stabilitas keamanan di Timur Tengah. Stabilitas keamanan di Timur tengah tidak dapat diwujudkan apabila masih banyaknya kelompok-kelompok organisasi ekstrimis yang sering membuat teror sehingga intervensi AS untuk mewujudkan demokrasi dapat menjadi jalan keluar terciptanya stabilitas di Timur tengah.

Pemerintahan Barrack Obama memilih orientasi arah kebijakan yang berbeda dengan Presiden pendahulunya, George W Bush Jr. Obama lebih mengedepankan kebijakan yang berorientasi pada perundingan dan kerjasama yang mencerminkan pandangan Liberalisme. Kebijakan Obama yang mengedepankan pandangan liberalisme membuat Obama memilih kebijakan

untuk menarik seluruh pasukan AS di Irak pada akhir tahun 2011 setelah sejak 2003 AS melakukan invasi militer menjatuhkan rezim Saddam Hussein yang di sinyalir memiliki senjata pemusnah masal. Keberadaan militer AS sempat menyentuh angka 170.000 tentara dan lebih dari 500 pangkalan tentara AS dan sekarang hanya terdapat 157 tentara yang mendapatkan tanggung jawab untuk mengamankan kedutaan besar AS di Baghdad serta kelompok kecil pasukan marinir yang bertanggung jawab untuk melindungi misi diplomatik AS di sekitar Irak (Tentara terakhir AS ditarik dari Irak, 2011). Penarikan pasukan AS di Irak dilakukan Obama setelah bertemu dengan perdana menteri Irak Nouri al-Maliki di Washington. Obama mengakhiri kebijakan yang identik dengan *Hawkish Foreign Policy* era George W Bush Jr. dan lebih mengedepankan kebijakan yang *softpower* dalam mengembangkan hubungan antara kekuatan AS dan politik luar negeri (Pavgi, 2011).

Presiden Barrack Obama memilih menyikapi ancaman di Timur Tengah kepada AS yang berasal dari aktor non negara (*non state actor*) ditunjukkan dengan dikeluarkannya kebijakan *Islamic Political Movement*. Kebijakan tersebut mengampanyekan islam moderat dari yang sebelumnya dianggap musuh oleh George W Bush Jr. Kebijakan yang menggeser posisi AS dalam menempatkan organisasi-organisasi Islam yang dianggap *fundamentalis* seperti Ikhawanul Muslimin. Meski demikian, sikap Obama yang mengedepankan pendekatan dengan nilai *liberalisme* mengalami permasalahan setidaknya sejak fenomena Arab Spring dimana Arab Spring disatu sisi membuka pintu demokrasi disisi yang lain memberikan kesempatan organisasi-organisasi atau partai politik Islam merebut kekuasaan yang berimplikasi menggeser aliansi AS di Timur tengah seperti yang terjadi di Suriah.

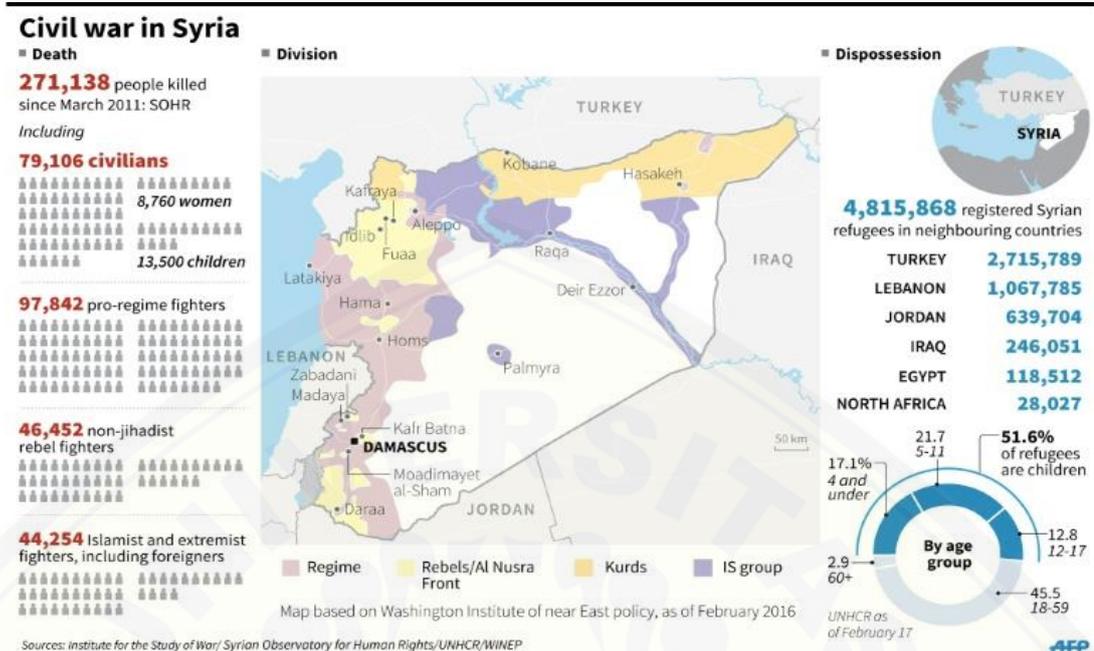
3.2 Kebijakan AS di Suriah

Sejumlah kebijakan AS terhadap Suriah dikeluarkan salah satunya adalah menyelenggarakan *Geneva Peace Talk* yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan *The Geneva Peacebuilding Platform* pada 20 September 2013 mendapatkan dukungan penuh dari AS (Gilley, 2013). Selain agenda *Geneva*

Peace Talk, AS juga menggelar dan mendorong serta menjadi pendukung utama dari rancangan resolusi dewan keamanan PBB nomor 2254 yang ditujukan untuk mendorong upaya transisi politik di Suriah. Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Suriah (nomor 2254) berisi tentang beberapa poin diantaranya: (BBC, 19 Desember 2015)

1. Menyerukan penyelesaian konflik dan perang sipil di Suriah dengan gencatan senjata dan perundingan formal mengenai transisi politik.
2. Kelompok yang dipandang sebagai ‘teroris’, termasuk ISIS dan Front Al-Nusra, dipinggirkan
3. ‘Aksi defensif dan ofensif’ terhadap kelompok-kelompok ini—mengacu pada serangan udara koalisi pimpinan AS dan Rusia—akan berlanjut.
4. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon akan melapor pada 18 Januari mengenai cara memantau gencatan senjata.
5. Tata pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian’ akan dibentuk dalam kurun enam bulan.
6. Pemilihan umum yang adil dan bebas’ di bawah pemantauan PBB akan diselenggarakan dalam 18 bulan.
7. Transisi politik harus dipimpin Suriah

Resolusi Dewan Keamanan PBB inilah yang menjadi landasan utama AS dan aliansi mendesak dan mendukung diturunkannya Presiden Bashar Al Assad yang dianggap telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Suriah dan kelompok pemberontakan Suriah. Bashar Al Assad juga dinilai membiarkan terjadinya perang sipil yang berlarut-larut di Suriah sehingga banyak warga Suriah yang menjadi korban. Setidaknya kurang lebih 360 ribu penduduk Suriah meninggal sejak perang sipil 2011. Korban lebih banyak yang meninggal dari pendukung Bashar Al Assad dan penduduk sipil (Santhika, 2018).

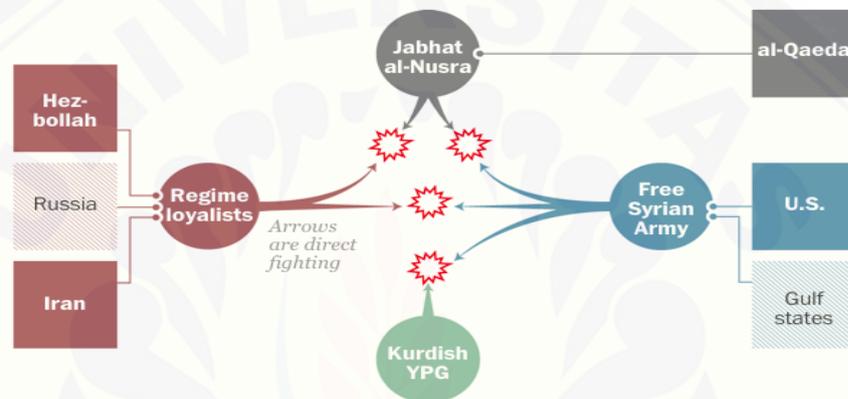


Gambar 3.1 Korban Perang Sipil Suriah

Sumber : US, France warn Syria government as peace talks set to begin. Dalam <https://www.vir.com.vn/us-france-warn-syria-government-as-peace-talks-set-to-begin-40703.html>

Berdasarkan gambar 3.1, korban tewas telah mencapai 271.138 yang didalamnya juga terdapat korban anak – anak yang mencapai angka 13.500 jiwa. Korban terbesar berasal dari kaum pro rezim Assad yang mencapai 97.842 disusul korban dari warga sipil Suriah yang mencapai 79.106 jiwa. Sementara dari kubu pemberontak telah menelan 46.452 korban jiwa dan korban dari kelompok islam ekstrimis dan teroris mencapai 44.254 jiwa. Konflik di Suriah juga menimbulkan gelombang pengungsi massal di berbagai negara dengan total warga negara Suriah yang menjadi pengungsi mencapai 4.815.863 jiwa yang 51,6%-nya adalah anak-anak berusia dibawah 17 tahun. Gelombang pengungsi tersebut tersebar di berbagai negara seperti Turki, Lebanon, Yordania, Iraq, Mesir, dan negara-negara lainnya. Dari data tersebut, banyaknya korban dari masyarakat sipil dan juga korban pengungsi menjadi landasan AS untuk mendesak turunnya Presiden Bashar al-Assad lalu mendesak Suriah untuk segera melaksanakan pemilu yang juga tertuang dalam resolusi DK PBB nomor 2254.

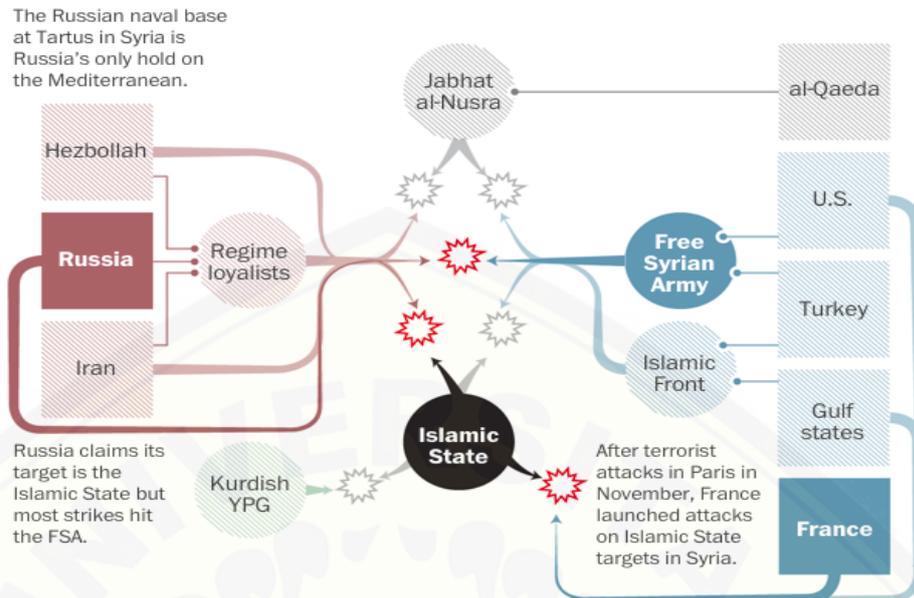
Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2254 yang di inisiasi oleh AS dan aliansinya mendapatkan penolakan dari Rusia dengan mengeluarkan veto. Rusia beranggapan bahwa Suriah dengan pemerintahan yang sah dapat mengakselerasi perdamaian sehingga dengan adanya transisi yang dipaksakan oleh dewan keamanan akan malah menjadikan konflik di Suriah berkepanjangan. Ketidaksepakatan Rusia atas resolusi dewan keamanan membuat konstelasi aktor internasional terhadap proses perdamaian di Suriah makin terpolarisasi antara AS dan Aliansi dan Rusia beserta aliansinya.



Gambar 3.2 Peta Polarisasi konflik Suriah

Sumber: Denise Lu dan Gene Thorp. How the growing web of conflict in Syria became a global problem. Dalam <https://www.washingtonpost.com/graphics/world/explaining-the-syrian-conflict/>

Peta gambar 3.2 menggambarkan konflik Suriah yang terpolarisasi semakin menajam dikarenakan perang sipil yang didukung militer dimulai antara loyalis rezim, FSA dan Jabhat al-Nusra. Rezim Bashar Al Assad didukung oleh aliansi Hezbollah, Rusia dan Iran. Sedangkan pihak oposisi pemerintahan Bashar Al Assad didukung oleh AS dan negara Teluk dengan mendukung penuh kelompok *Free Syrian Army*. Konflik Suriah semakin menajam ketika kedua kelompok Bashar Al Assad maupun *Free Syrian Army* mendapatkan perlawanan dari Jabhat al-Nusra yang berafiliasi dengan Al Qaeda dan kelompok kurdis. Kompleksitas konflik Suriah semakin besar karena hadirnya negara-negara luar (*outsider*) seperti Rusia dan AS, serta munculnya kelompok-kelompok seperti Kurdis dan Jabat al Nusra.



Gambar 3.3 Peta Polarisasi konflik Suriah paska ISIS

Sumber: Denise Lu dan Gene Thorp. How the growing web of conflict in Syria became a global problem. Dalam <https://www.washingtonpost.com/graphics/world/explaining-the-syrian-conflict/>

Kompleksitas konflik antar aktor di Suriah diperparah dengan rivalitas antar aktor yang dapat dibagi kedalam empat aktor utama seperti dalam gambar 3.3. Empat aktor yang diantaranya adalah kelompok yang loyal kepada rezim, Kurdish YPG, *Free Syrian Army*, dan Jabhat Al Nusra. Rivalitas kelompok yang loyal kepada pemerintah yang didukung oleh Rusia, Iran dan Hezbollah berkonflik dengan *Free Syrian Army* yang didukung Amerika Serikat dan negara-negara teluk seperti Arab Saudi. Konflik semakin menajam ketika kedua aktor baik kelompok yang loyal kepada rezim mendapatkan perlawanan dari dua kelompok kurdis dan Jabhat Al Nusra yang notabene kedua aktor tersebut juga terlibat konflik satu sama lainnya.

Konflik Suriah terus memburuk ketika Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mulai aktif berperang di Suriah. Hadirnya ISIS membuat peta konflik di Suriah semakin rumit. Empat aktor yang sebelumnya terlibat konflik di Suriah, disatu sisi juga bersengketa dengan ISIS dan disisi lain konflik yang melibatkan empat aktor yang sebelumnya sudah eksis terus berlangsung. Hadirnya tetapi tetap

saling berperang satu sama lain. Seriusnya serangan FSA membuat Suriah meminta bantuan Rusia untuk melakukan operasi udara di Suriah sebagai upaya untuk menekan mundur pasukan FSA. Selain itu serangan juga dilakukan Prancis sebagai upaya pembalasan bom Paris dengan melakukan serangan di kota Raqqa, Suriah yang mana merupakan ibukota *de facto* ISIS. (Jonathan Marcus, 17 November 2015) Bagi AS dengan mendukung FSA untuk menjatuhkan kelompok rezim Bashar al Assad maka akan dapat tercipta demokratisasi yang didasak oleh kelompok FSA. Cara yang demikian merupakan cara AS untuk menegakkan nilai-nilai demokratis dalam menjatuhkan rezim otoritarian Bashar Al Assad.

Kekuatan FSA yang terus menguat membuat Rusia menempatkan kapal perang di laut mediterania sebagai respon dukungan AS terhadap FSA. Keputusan Rusia mendapatkan kecaman dari AS dan aliansi karena akan membuat konflik terbuka dan malah menguatkan dukungan terhadap pemerintahan yang otoriter dan tidak mampu menyelesaikan perang sipil di Suriah (Lu & Thorp, 2016). Dalam kelompok koalisi oposisi semakin bertambah banyak dengan hadirnya Turki dan Prancis yang dipicu oleh semakin banyaknya serangan yang dilakukan ISIS terutama di negara – negara Eropa termasuk di Paris, Perancis pada tahun 2015. Oleh karena itu seperti dijelaskan dalam tabel 3.2, Peta konflik Suriah semakin konflik. Aktor satu sama lainnya saling berkonflik yang melibatkan membesarnya aktor luar ikut dalam medan konflik seperti Al Qaeda, Turki dan Prancis.

Pada konteks strategis, AS menggunakan pihak lain (FSA) untuk mendesak proses demokrasi dan menghindari serangan militer langsung ke Suriah. Strategi mendukung milisi bersenjata seperti FSA untuk menurunkan rezim sangat berbeda dengan strategi AS dalam mendesak proses demokratisasi di Irak pada era George W Bush Jr dengan melakukan serangan langsung. AS membirikan dukungan kepada FSA dengan memberikan persetujuan pengiriman persenjataan. Meski demikian langkah AS di Suriah mendapatkan kritik dari dunia internasional karena dengan kuatnya kelompok bersenjata seperti FSA dan Al Nusra, perang

yang mengakibatkan korban sipil tidak dapat dihindarkan bahkan hadirnya ISIS membuat Rezim Assad maupun *Free Syrian Army* sama-sama melawan ISIS akan kelompok bersenjata membuat situasi semakin kompleks dan hadirnya ISIS yang mendeklarasikan negara khilafah. Strategi AS dengan mendukung kelompok bersenjata membuat ISIS semakin menguat yang membuat AS dibawah pemerintahan Obama mengumumkan serangan udara untuk melawan ISIS di Irak dan di Suriah pada 2014 (Nelson, 2016). Keputusan Obama untuk melakukan serangan terhadap ISIS di Suriah tidak hanya berkebalikan dengan strategi berdasarkan nilai liberalisme yang percaya pada kerjasama dan menjauhkan diri dari konfrontasi militer juga mendapatkan perlawanan dari politik domestik di Kongres.

Obama dalam upayanya dalam melawan ISIS dianggap oleh Kongres tidak memiliki landasan yang kuat meski demikian pemerintahan Obama percaya bahwa serangan terhadap ISIS memiliki landasan *Authirization for Military Force* (AUMF) 2001 yang juga digunakan landasan pemerintahan George W Bush Jr untuk melakukan serangan terhadap Irak dan Al Qaeda. Perpecahan suara antara yang mendukung obama dan yang menolak upayanya dalam memberantas ISIS di Kongres membuat Obama menekankan dalam pidatonya saat di Kongres yang mengatakan bahwa (Timm, 2015):

“Finally, if Congress believes, as I do, that we are at war with ISIS, it should go ahead and vote to authorize the continued use of military force against these terrorists. For over a year, I have ordered our military to take thousands of air strikes against ISIS targets. I think it’s time for Congress to vote to demonstrate that the American people are united and committed to this fight”

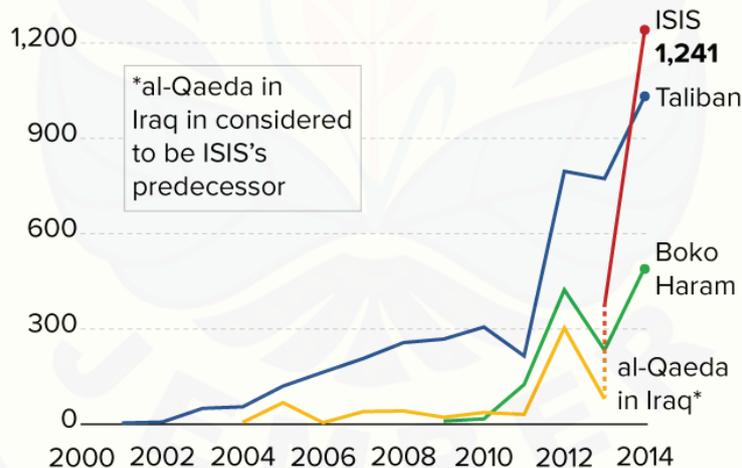
Pernyataan tersebut sebagai penekanan Obama terhadap upayanya dalam memberantas kelompok teroris ISIS dan berharap dukungan dan komitmen dari kongres untuk dapat dukungan serta persetujuan untuk menggunakan kekuatan militer yang terus menerus.

Pemerintah AS melakukan berbagai cara untuk memberantas ISIS baik secara militer maupun diplomasi. Secara militer pemerintah AS memberikan dukungan terhadap kelompok bersenjata seperti FSA atau

melakukan perlawanan terhadap ISIS. Secara diplomasi, pemerintah AS menggalang dukungan dari mitra koalisi dan dunia internasional untuk bersama-sama melawan ISIS maupun rezim Bashar Al Assad. Dalam melawan ISIS, AS mendapatkan dukungan setidaknya dari 73 negara untuk menghadapi ISIS dan merehabilitasi daerah-daerah yang dikuasai ISIS serta memberikan bantuan terhadap masyarakat sipil. Koalisi global melawan Daesh (*Global Coalition against Daesh*) misalnya telah mengumpan mendapatkan bantuan dari Prancis untuk proses rehabilitasi sebesar USD 12,4 juta (Goldenberg & Heras, 2018). AS dan FSA juga melakukan proses rehabilitasi Raqqa dan kota Tabqa serta membentuk pasukan keamanan sebesar 30.000 pasukan.

THE RISE OF ISIS

ISIS's attacks are growing faster than attacks by other terrorist organizations. From 2013–2014 the number of attacks by ISIS increased 233 percent from 373 to 1,241.



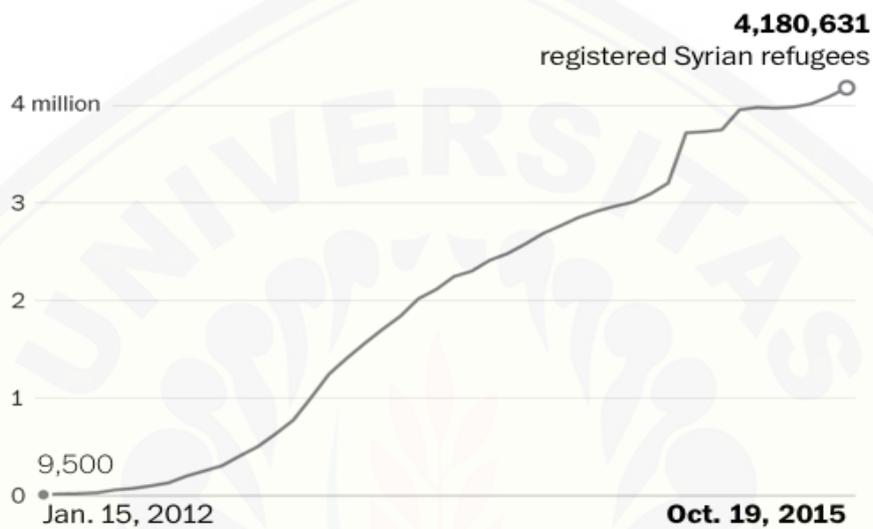
SOURCE
Global Terrorism Database

abc NEWS

Gambar 3.4 Grafik Data Serangan ISIS

Sumber: Sobering Chart Shows ISIS Is the Terror Group With Most Mass Killings Since 2000. Dalam <https://abcnews.go.com/International/sobering-chart-shows-isis-terror-group-mass-killings/story?id=35241284>

Munculnya ISIS dalam peta konflik Suriah membuat instabilitas domestik Suriah dan kawasan terus memburuk. Dalam tabel 3.4, serangan ISIS mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 ke 2014 sebesar 233% dari yang semula berjumlah 373 serangan meningkat ke 1241 serangan pada tahun 2014. Besarnya serangan ISIS sangat menjadi ancaman yang serius bagi Suriah. Hal ini apabila dibandingkan dengan serangan yang dikajukan oleh Taliban, Boko Haram dan Al Qaeda sejak kurung waktu 2000 (Taliban), Al Qaeda (2004) dan Boko Haram (2008), serangan yang diinisiasi ISIS jauh lebih besar dengan durasi yang hanya 1 tahun. Ketidakstabilan di Suriah bagi AS akan berdampak pada tidak hanya keamanan domestik Suriah, juga akan berdampak pada stabilitas keamanan regional dan internasional. Keputusan membangun ulang dengan menggunakan mitra FSA di Suriah mendapatkan dukungan dari koalisi dan dunia internasional. Bagi AS dan dunia internasional krisis politik di Suriah mengakibatkan menguatnya ancaman terorisme yang disebabkan lemahnya pemerintahan Bashar al Assad, selain menguatnya terorisme, krisis politik di Suriah juga mengakibatkan krisis kemanusiaan dengan semakin tingginya lonjakan imigrasi yang berasal dari penduduk sipil Suriah yang tersebar ke Seluruh dunia terutama di Jordania, dan Turki. Hadirnya imigranungsi dari Suriah disatu sisi menjadi bagian dari ancaman keamanan nasional (Jones, 2019).



Gambar 3.5 Grafik Data Pengungsi Suriah

Sumber: Denise Lu dan Gene Thorp. How the growing web of conflict in Syria became a global problem. Dalam <https://www.washingtonpost.com/graphics/world/explaining-the-syrian-conflict/>

Grafik 3.1 menggambarkan betapa besar kenaikan jumlah pengungsi yang semula hanya 9500 jiwa pada tahun 2012 meningkat 44.007% yang kini mencapai 4.180.631 jiwa pada tahun 2015. Membesarnya angka pengungsi akibat konflik di Suriah tidak hanya membuat krisis kemanusiaan di Suriah, akan tetapi juga mempengaruhi stabilitas tidak hanya regional Timur tengah akan tetapi juga global. Paska serangan ISIS yang notabenenya dilakukan oleh orang Timur Tengah di negara-negara barat seperti Prancis membuat isu pengungsi menjadi permasalahan terhadap keamanan domestik negara tujuan pengungsi (Sanchez, 2015).

Kompleksitas permasalahan di Suriah membuat AS dan koalisi terus memaksakan penyelesaian dengan mendesak adanya transisi politik dengan menurunkan rezim Bashar Al Assad dan mulai melakukan proses rehabilitasi kota-kota yang mengalami kerusakan akibat perang sipil. Selain transisi politik, tekanan baik secara militer dengan dukungan internasional terhadap kelompok-kelompok yang membuat proses perdamaian di Suriah semakin jauh dapat dibenarkan seperti yang dilakukan Obama dengan mengerahkan militer melakukan serangan ISIS di Irak maupun di Suriah.

Posisi Suriah yang strategis di Timur tengah membuat AS memiliki kepentingan untuk menjaga hegemoninya di Timur tengah. Hadirnya negara-negara rival AS seperti Iran dan Rusia membuat Suriah menjadi medan pertempuran perebutan hegemoni kedua negara. Kompleksitas konflik Suriah yang melibatkan banyak aktor baik level negara atau level *non state* aktor menjadikan Suriah sebagai medan perang proxy dalam perebutan hegemoni dan kepentingan di Suriah dan Timur tengah.

BAB 5. KESIMPULAN

Skripsi ini membahas tentang intervensi Amerika Serikat di Suriah. Amerika Serikat memiliki banyak kepentingan yang menjadi landasannya untuk mengintervensi Suriah. Dalam kajian ini, penulis menggunakan kerangka konsep Kepentingan Nasional untuk menganalisa apa saja kepentingan Amerika Serikat yang menjadi landasannya untuk mengintervensi konflik di Suriah. Kajian ini menarik dibahas karena banyaknya aktor *state* maupun *non-state* yang ikut terlibat di dalam konflik Suriah dan juga adanya rivalitas antara Amerika Serikat dan Russia di Suriah

Intervensi militer Amerika Serikat dilakukan karena konflik di Suriah semakin terekskalasi seiring dengan digunakannya senjata kimia oleh pemerintah Suriah. Respon tersebut dilandasi oleh kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah termasuk di Suriah yakni, memberantas terorisme, mempromosikan demokrasi, menjaga stabilitas keamanan di Timur Tengah, serta memastikan ketersediaan pasokan energi bagi konsumsi negaranya terpenuhi. Posisi Suriah yang strategis dari aspek geopolitik membuat AS memiliki banyak dimensi kepentingan AS seperti kepentingan menjaga stabilitas kawasan. Status AS sebagai negara hegemon di kawasan Timur tengah, konflik Suriah yang melibatkan aktor rival AS yaitu Rusia di dunia internasional menjadi ancaman bagi AS atas status sebagai negara *great power*. Posisi Suriah yang terletak di jalur dagang dunia yaitu Laut Mediterania. Jalur laut mediteranaia yang merupakan jalur strategis (*choke point*) perdagangan membuat banyaknya aktor global memperebutkan penguasaan laut mediterania sehingga menguasai Suriah menjadi strategis untuk menguasai laut mediterania. Hal ini yang menyebabkan AS akan terus memperkuat pengaruh di Suriah dalam rangka akumulasi kekuatan di Laut Mediteranian.

Perebutan pengaruh tidak hanya pada level spasial atau geopolitik tetapi juga pada hegemoni. Status sebagai *great power* membuat AS memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan. Munculnya ISIS yang membuat instabilitas kawasan menjadi ancaman bagi AS sehingga menjadi pemicu (*triger*)

bagi AS untuk melakukan serangan langsung terhadap ISIS. Serangan ISIS terhadap *Free Syrian Army* di Raqqa menjadi ancaman AS di Suriah dimana FSA merupakan kepanjangan tangan AS dalam perebutan kepentingan di Suriah. Situasi yang demikian membuat Amerika Serikat melakukan serangan langsung untuk dua kepentingan yaitu menjaga status *great power* yang membawa stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah dan dunia serta kepentingan AS yang di Raqqa melalui FSA yang mulai terancam oleh serangkaian serangan ISIS. Kepentingan proses demokratisasi Suriah yang sudah dilakukan sejak Suriah mengalami perang sipil pada 2011 dimana AS menganggap pemerintahan Bashar Al Assad yang otoritarian mengalami kegagalan yang mengakibatkan Suriah sebagai negara gagal dan Proses demokratisasi akan membuat Suriah merekonstruksi ulang negara yang demokratis. Selain itu AS menganggap Bashar Al Assad represi dan genosida terhadap para pemberontak dengan senjata kimia.

Serangan AS kepada Suriah selain dilatarbelakangi oleh peristiwa diatas juga didasarkan pada kepentingan penguasaan terhadap pasokan energi. Kepentingan ekonomi politik menjadi faktor penting keputusan AS untuk melakukan serangan langsung ke Suriah sebagai bagian perluasan penguasaan minyak di kawasan Timur tengah diluar negara-negara teluk sebagai pemasok kebutuhan energi AS. Pengamanan jalur minyak yang melalui jalur strategis untuk perdagangan minyak dan gas dari Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandab, sampai Laut Mediterania dengan menempatkan kekuatan militer AS di sepanjang jalur-jalur strategis tersebut. Apalagi Suriah merupakan wilayah perebutan (*battle ground*) dimana rival AS yaitu Rusia dan Iran sudah mulai menguasai Suriah dibawah rezim Bashar Al Assad.

Oleh karena itu menggulingkan rezim Bashar Al Assad dengan mengerahkan kekuatan FSA serta melakukan serangan terhadap ISIS akan menguntungkan AS dalam memenuhi kepentingan politik internasional AS di kawasan Timur tengah. Keputusan AS untuk melakukan invasi didukung oleh faktor kalkulasi kepentingan suplai gas terhadap negara-negara aliansi yaitu Eropa. Pasokan gas dari Qatar yang melewati Suriah harus diamankan oleh AS dan aliansinya agar terus mendapatkan pasokan gas. Faktor pendorong lainnya

yang mengakibatkan AS melakukan serangan langsung ke Suriah karena rezim Bashar Al Assad di dukung oleh Rusia, dimana Rusia merupakan negara great power yang menjadi rival AS dalam perebutan dominasi pengaruh global. Hadirnya Rusia dalam konstelasi krisis politik Suriah sangat membahayakan pasokan minyak dan gas dari negara aliansi AS di Timur tengah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bartholomees, J. (2010). *The US Army Collage Guide to National Security Issues Volume 1 Theory of War and Strategy*. US Army War Collage.
- Booth, K. (1991). *Security in Anarchy: Utopian realism in Theory and Practice*. Oxford University Press.
- Dobson, A. P., & Marsh, S. (2006). *US Foreign Policy Since 1945*. New York: Routledge.
- Roskin, M. G. (1994). *National Interest: From Abstraction To Strategy*. US Army War Collage.
- Hudson, M. C. (1977). *Arab Politics the search for legitimacy*. London: Yale University Press.
- Alex Mintz and Karl DeRouen. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. New York: United States of America by Cambridge University Press.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kauppi, Paul R. Viotti dan Mark V. (1993). *International Theory : Realism, Pluralism, Globalism*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Koledziej, E. A. (2007). *Testing security theories: explaining the rise and the demise of the Cold War*. Cambridge University Press.
- Kusumohamidjojo, B. (1987). *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analistis*. Bandung: Banacipta.
- Morgenthau, H. J. (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America.

- Sulaiman, D. (2013). Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional. Dalam D. Sulaiman, *Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional* (hal. 100). Depok: Pustaka Iman.
- Sorensen, R. J. (1999). *Introduction to International Relation*. Oxford: Oxford University Press.
- Starke, J. G. (1989). *Introduction to International Law*. Butterworths.
- Brezinski. (1997). The Grand Chessboard. Dalam Brezinski, *American Primacy And Its Geostrategic Imperative* (hal. 37). New York: Basic Book.
- T. V. Paul, J. J. (2004). *Balance of Power Theory and Practice in the 21st Century*. Stanford, California: Stanford University Press.

Jurnal:

- Bahar, Z. (2004). Universitas Jember jurnal skripsi. *Dukungan Amerika Serikat Terhadap Kelompok Oposisi Suriah*, 5.

Internet atau website:

- BBC Indonesia. (2018, Maret 15). Sepuluh pertanyaan untuk memahami konflik Suriah. Dipetik Januari 15, 2019, dari BBC Indonesia :
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43403254>
- Jonas, D. (2019, Januari 23). *Turkey's Erdogan Lays Out Plans for Syria Security Zone*. Dipetik Januari 31, 2019, dari VOA News:
<https://www.voanews.com/a/turkey-erdogan-lays-out-plans-for-syria-security-zone/4756133.html>
- Jones, I. R. (2017, April 11). *Why does Russia support Syria and President Assad?* Dipetik Januari 31, 2019, dari BBC News:
<http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/39554171/why-does-russia-support-syria-and-president-assad>
- Riza, B. (2018, Desember 25). *Trump Minta Bantuan Erdogan Kalahkan ISIS di Suriah*. Dipetik Mei 27, 2019, dari Tempo.co:
<https://dunia.tempo.co/read/1158590/trump-minta-bantuan-erdogan-kalahkan-isis-di-suriah>
- BBC Indonesia. (2011, April 9). Demonstrasi Suriah telan korban jiwa. Dipetik Juni 20, 2019, dari BBC Indonesia:
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/04/110408_syrianrally

- BBC. (2012, Mei 24). *PBB menyatakan tentara Suriah banyak melanggar HAM*. Dipetik Januari 16, 2019, dari BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/05/120524_un_syria
- BBC. (2013, Juni 14). *AS akan berikan bantuan militer kepada oposisi Suriah*. Dipetik Mei 30, 2017, dari www.BBC.com: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130614_suriahas
- BBC. (2013, Agustus 21). *Serangan Senjata Kimia Pemerintah Suriah*. Dipetik Januari 16, 2019, dari BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/08/130821_suriah_kimia
- BBC. (2014, Juli 25). *BBC Indonesia*. Dipetik Januari 17, 2019, dari Bagaimana kelompok jihadis ISIS terbentuk?2014: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140725_profil_isis
- BBC. (2017, April 6). *Serangan Senjata Kimia di Suriah, Siapa yang Bertanggung Jawab ?* Dipetik Mei 30, 2017, dari www.BBC.com: <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39514573>
- Britannica, T. E. (2018, December 6). *Encyclopedia Britannica*. Dipetik Januari 15, 2019, dari Syrian Civil War: <https://www.britannica.com/event/Syrian-Civil-War>
- Catherine Burns. (2016, Desember 15). *10 perkara yang perlu diketahui tentang Aleppo dan Suriah*. Dipetik Mei 25, 2017, dari www.BBC.com: <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38325140>
- Detik News. (2012, November 30). *Negara-negara 'Friends of Syria' Sepakat Tingkatkan Tekanan atas Assad*. Dipetik Mei 29, 2017, dari www.detik.com: <http://news.detik.com/internasional/2106411/negara-negara-friends-of-syria-sepakat-tingkatkan-tekanan-atas-assad>
- Detik News. (2013, September 28). *Detik News*. Dipetik Januari 16, 2019, dari Akhirnya! DK PBB Keluarkan Resolusi Penghancuran Senjata Kimia Suriah: <https://news.detik.com/internasional/2372085/akhirnya-dk-pbb-keluarkan-resolusi-penghancuran-senjata-kimia-suriah>
- kompas. (2017, April 28). *AS Dorong DK PBB Tekan Rusia agar Akhiri Konflik Suriah*. Dipetik Mei 29, 2017, dari www.kompas.com: <http://internasional.kompas.com/read/2017/04/28/15020901/as.dorong.dk.pbb.tekan.rusia.agar.akhiri.konflik.suriah>
- Misrawi, Z. (2018, April 19). *Ketangguhan Bashar al Assad*. Dipetik Oktober 28, 2018, dari Detik News: <https://news.detik.com/kolom/d-3979250/ketangguhan-bashar-al-assad>
- Muhaimin. (2017, April 7). *AS Berubah Sikap, Ingin Rezim Suriah Tumbang*. Dipetik Mei 30, 2017, dari www.sindonews.com:

<https://international.sindonews.com/read/1194995/42/as-berubah-sikap-ingin-rezim-suriah-tumbang-1491518591>

Novi Christiastuti. (2016, Desember 17). *Obama Pertahankan Keputusan Tak Intervensi Militer di Suriah*. Dipetik Mei 30, 2017, dari www.detik.com: <https://news.detik.com/internasional/d-3373784/obama-pertahankan-keputusan-tak-intervensi-militer-di-suriah>

Novi Christiastuti. (2017, April 7). *Trump Perintahkan Serang Suriah Usai Serangan Kimia*. Dipetik Mei 30, 2017, dari www.detik.com: <https://news.detik.com/internasional/d-3467752/trump-perintahkan-serang-suriah-usai-serangan-kimia>

Profil Suriah. (t.thn.). Dipetik Juni 29, 2018, dari KBRI Damaskus: <https://www.kemlu.go.id/damascus/id/Pages/PROFIL-SURIAH.aspx>

Renne R.A Kawilarang. (2011, Mei 19). *AS Bekukan Aset Presiden Suriah*. Dipetik Mei 27, 2017, dari www.viva.co.id: <http://www.viva.co.id/berita/dunia/221224-as-jatuhkan-sanksi-kepada-presiden-suriah>

Samsa, G. (2017, April 10). *Warta Ekonomi*. Dipetik Maret 19, 2018, dari www.wartaekonomi.co.id: <https://www.wartaekonomi.co.id/read137204/masalah-suriah-dan-kepentingan-amerika-serikat.html>

subekti, s. (2014, Januari 30). *Profil Hafez Al-Assad: Pendiri Dinasti Al-Assad di Suriah*. Dipetik Oktober 25, 2018, dari Satu Harapan: <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/profil-hafez-al-assad-pendiri-dinasti-al-assad-di-suriah>

UNHCR. (2017, mei 22). *Searching for Syria? Google and UNHCR offer answers to five top questions*. Dipetik mei 25, 2017, dari www.unhcr.org: <http://www.unhcr.org/news/press/2017/5/5921922c4/searching-syria-google-unhcr-offer-answers-five-top-questions.html>

Yasinta, V. (2018, September 14). *360.000 Orang Tewas Selama 7 Tahun Perang Suriah*. Dipetik Januari 17, 2019, dari Kompas Internasional: <https://internasional.kompas.com/read/2018/09/14/08224011/360000-orang-tewas-selama-7-tahun-perang-suriah>.

Azarya, H.S. (2015, September 28). *Militer Perancis Mulai Menggempur ISIS di Suriah*. Dipetik April 23, 2019, dari www.cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150928133016-120-81354/militer-perancis-mulai-menggempur-isis-di-suriah>

The Washington Post. (2014, Oktober 13) *Foreign Fighters Flow to Syria*. Dipetik April 23, 2019, dari <http://www.soufangroup.com/>:

<http://www.soufangroup.com/tsg-report-quoted-in-wapo-foreign-fighters-flow-to-syria/>

Bender, J. (2015, April 1) These 8 narrow chokepoints are critical to the world's oil trade . Dipetik April 23, 2019 dari business insider:
<https://www.businessinsider.com/worlds-eight-oil-chokepoints-2015-4/?IR=T>

VOA Indonesia (2019, Januari 9) Trump: Penarikan Mundur Pasukan AS dari Suriah Dilakukan secara Tepat. Dipetik April 23, 2019 dari www.voaindonesia.com:
<https://www.voaindonesia.com/a/trump-penarikan-mundur-pasukan-as-dari-suriyah-dilakukan-secara-tepat/4733110.html>

VOA Indonesia. (2011, Maret 8) Aksi Protes di Suriah, Sedikitnya 36 Tewas: Dipetik Januari 15, 2019, dari www.voaindonesia.com
<https://www.voaindonesia.com/a/tentara-suriyah-tewaskan-7-demonstran-di-daraa-119490244/91864.html>

Goldman, R. (2017, April 5). *Assad's History of Chemical Attacks, and Other Atrocities*. Dipetik Januari 31, 2019, dari The New York Times:
<https://www.nytimes.com/2017/04/05/world/middleeast/syria-bashar-al-assad-atrocities-civilian-deaths-gas-attack.html>

Nelson, S. (2016, Agustus 6). *Obama's ISIS War Enters Year 3 as Court Fight Over Its Legality Heats Up*. Dipetik Januari 31, 2019, dari U.S News:
<https://www.usnews.com/news/articles/2016-08-06/obamas-isis-war-enters-year-3-as-court-fight-over-its-legality-heats-up>

Hasan, R. A. (2018, Agustus 28). Rusia Tempatkan Armada Angkatan Laut di Suriah, Antisipasi Serangan AS?. Dipetik September 8, 2019 dari www.liputan6.com
<https://www.liputan6.com/global/read/3631097/rusia-tempatkan-armada-angkatan-laut-di-suriyah-antisipasi-serangan-as>

Santhika, E. (2018, Juni 24). Rusia Lakukan Serangan Bom Udara di Selatan Suriah. Dipetik September 8, 2019 dari www.cnnindonesia.com (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180624082917-120-308537/rusia-lakukan-serangan-bom-udara-di-selatan-suriah>)



BBC Indonesia (2018, April 11) Rusia desak AS hentikan rencana aksi militer ke Suriah Dipetik April 23, 2019, dari www.bbc.com:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43721846>

